



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

RENJA

DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Rencana Kerja ini substansinya menjabarkan potret permasalahan ketenagakerjaan serta program tahun 2025 yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara terencana dan bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan yang ada.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar untuk periode Tahun 2025 yang memuat rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 beserta indikator-indikator kinerja program/kegiatan rincian target kinerja berupa masukan (input), keluaran (outputs) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran. Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategik yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sistem penganggarnya.

Untuk tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar merencanakan 5 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 20 kegiatan dan 60 subkegiatan untuk mencapai 2 tujuan dan 4 sasaran





yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025, dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 14.144.800.000,- (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendukung kebijakan umum Pemerintah Kota Makassar yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya dengan penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan di Kota Makassar.

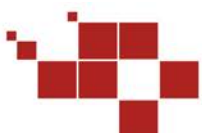
Makassar, 19 Juli 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH. M.AP

Pangkat: Pembina Utama Muda/IVc

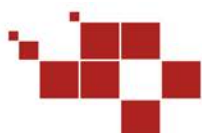
NIP : 19651210 199112 2 006





DAFTAR ISI

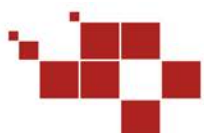
i	Kata Pengantar
iii	Daftar Isi
iv	Daftar Tabel
v	Daftar Grafik
1	BAB I. Pendahuluan
1	1.1. Latar Belakang
2	1.2. Landasan Hukum
5	1.3. Maksud Dan Tujuan
6	1.4. Sistimatika Penulisan
10	BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
10	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
43	2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
46	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD
53	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2025
59	2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
64	BAB III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah
64	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
70	3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
74	3.3. Program dan Kegiatan
86	BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
86	4.1. Rencana Kerja
92	4.2. Pendanaan
93	BAB V. Penutup
93	5.1. Catatan Ketersediaan Anggaran
93	5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
94	5.3. Rencana Tindak Lanjut
96	LAMPIRAN





DAFTAR TABEL

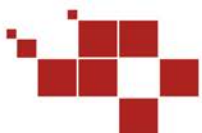
24	Tabel 2.1. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2023
25	Tabel 2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023
28	Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
35	Tabel 2.4. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
39	Tabel 2.5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
44	Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Sampai Dengan Tahun 2023
50	Tabel 2.7. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2019 s.d 2023
52	Tabel 2.8. Analisa SWOT dalam Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar
55	Tabel 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
60	Tabel 2.10. Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Makassar
69	Tabel 3.1. Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
70	Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Makassar
72	Tabel 3.3. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional & Provinsi
73	Tabel 3.4. Cascading Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Kota Makassar
74	Tabel 3.5. Rumusan Program Prioritas
77	Tabel 3.6. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah
80	Tabel 3.7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026





DAFTAR GRAFIK

- 17 Grafik 2.1. Perkembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi
- 19 Grafik. 2.2. Penempatan Tenaga Kerja
- 20 Grafik. 2.3. Perluasan Kesempatan Kerja
- 23 Grafik. 2.4. Perkembangan Perselisihan Hubungan Industrial





BAB I

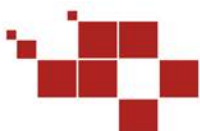
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Makassar.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah sedemikian rupa sehingga





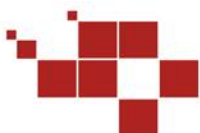
berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Adapun capaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d tahun 2023 sebesar 73,54 persen.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang memuat Rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta rincian target kinerja capaian program yang akan di capai pada tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Ketenakerjaan Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

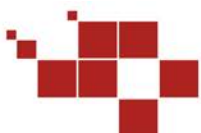
Dasar hukum yang menjadi landasan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau 1 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem





- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Data dan Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran





- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 706);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

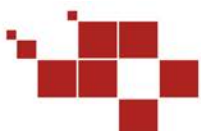




18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 773);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55);
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 111);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan; dan
27. Peraturan Walikota Makassar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai bagian awal dari tahapan pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kota Makassar untuk tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 memuat rencana Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun





2025 beserta rencana anggaran serta indikator pencapaian Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah untuk :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025 ke dalam program dan kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar; dan
4. Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2025 nantinya dapat terlaksana secara lebih terarah berdasarkan Indikator Capaian Program/Kegiatan yang akan/telah disusun sebelumnya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan arah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2021-2026.

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 disesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan urutan sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan





perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

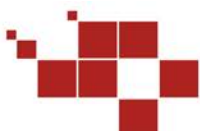
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan capaian sampai dengan triwulan I tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas ketenagakerjaan





Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU dan terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

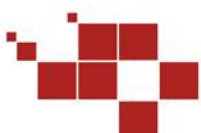
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Dinas Ketenagakerjaan

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah





kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah melalui Musrenbang Kota dan Pokok Pikiran (POKIR).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketenagakerjaan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

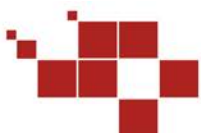
Dalam Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (sampai dengan triwulan II Tahun 2024) serta capaian pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024.

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2023 tercermin sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu: 1). Meningkatnya Pemerataan Kesempatan Kerja yang Didukung oleh Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; 2). Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja; 3). Terwujudnya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan untuk pembangunan bidang ketenagakerjaan tahun anggaran 2023 direncanakan dalam 5 program yang dijabarkan dalam 20 kegiatan dan 59 subkegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.18.266.855.572,- (delapan belas milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.17.901.837.922,- (tujuh belas milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dan belanja modal sebesar Rp.365.017.650,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp.16.992.250.299,- (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 93,02 persen.





Rata-rata capaian target kinerja 5 program tahun 2023 sebesar 96,95 persen atau capaian berkinerja sangat tinggi (91% ≤ 100%).

Adapun realisasi program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

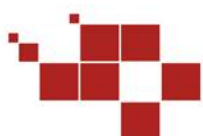
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,41%	90%	91,92%	102,13%
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah)	100,00%	100%	100,00%	100,00%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	68,25%	90%	88,52%	98,36%

Rata-rata capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 100,16 persen atau kategori berkinerja sangat tinggi. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut:

- Dari target 90 persen Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 91,92 persen atau dengan capaian sebesar 102,13 persen. Dimana dari 198 sarana dan prasarana aparatur lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 182 sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 100 persen atau dengan capaian sebesar 100 persen. Dimana dari 24 Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja telah disusun sebanyak 24 Laporan; dan
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 88,52 persen atau dengan capaian sebesar 98,36 persen. Dimana dari 61 ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 54 ASN mendapatkan peningkatan kapasitas.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 32 (tiga





puluh dua) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.10.714.718.462,- (sepuluh milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.749.748.366,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau sebesar 90,99 persen.

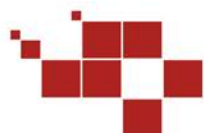
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No.25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan stakeholder sekaligus memberikan kepuasan kepada stakeholder yang dilayani.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada stakeholder, sudah tentu suatu pelayanan publik yang diselenggarakan



pemerintah harus mencakup seluruh stakeholder yang membutuhkannya. Artinya jangan ada “tebang pilih” dalam pelaksanaannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana stakeholder dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Oleh karena itulah, Dinas Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran tersebut melakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya meliputi:





- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah attitude atau perilaku;
- Menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik salah satunya dengan Menyusun SOP dan Peta Proses Bisnis;
- Meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik melalui pengadaan/perbaikakan sarana dan prasarana, penyediaan fasilitas untuk difabel, dan ruang laktasi; serta
- Penyediaan sarana pengaduan.

Adapun perbaikan secara internal dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu melalui rapat koordinasi untuk membahas program kerja, permasalahan dan solusi pemecahan. Selain itu keterlibatan pimpinan tertinggi secara langsung dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Melakukan evaluasi kinerja pegawai setiap triwulannya.

Faktor Penghambat:

Dalam pelaksanaan pencapaian target / kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dalam rangka pemenuhan kebutuhan unit kerja.

Faktor Pendukung:

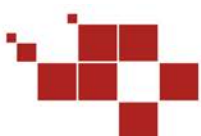
Dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- Ketersediaan anggaran; dan
- Komitmen pimpinan dan ASN Lingkup Dinas Ketenagakerjaan dalam pemberian pelayanan.

Tindak Lanjut:

Tindak Lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain:

- Peningkatan kapasitas aparatur untuk menunjang penyelenggaraan tata kelola penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan.





2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Yang Disusun	93,33%	93,55%	93,33%	99,77%

Rata-Rata capaian kinerja program sebesar 99,77 persen atau kategori berkinerja sangat tinggi. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut:

- Dari target 93,55 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja terealisasi sebesar 93,33 persen atau dengan capaian sebesar 99,77 persen. Dimana dari 30 kegiatan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja (RTK) terealisasi sebanyak 28 kegiatan.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.108.599.000,- (seratus delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.85.322.540,- (delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 78,57 persen.

Faktor Penghambat:

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- Masih minimnya kesadaran perusahaan dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro.

Faktor Pendukung:

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- Telah tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar Tahun 2022-2026; dan
- Terbentuknya Forum HRD.

Tindak Lanjut:

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain:





- Lebih melibatkan Forum HRD yang sudah di bentuk dalam penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
- Sosialisasi Kebijakan yang tertuang Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Makassar tahun 2022-2026.

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,53%	0,58%	0,65%	92,17%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20,69%	21,00%	20,05%	93,26%
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.124 Orang	1.060 Orang	962,00 Orang	96,20%

Rata-rata capaian kinerja program sebesar 93,87 persen atau kategori berkinerja tinggi. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut:

- Dari target 0,70 persen Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi terealisasi sebesar 0,65 persen atau dengan capaian sebesar 92,17 persen. Dimana dari 387.180 jiwa tenaga kerja sebanyak 24.98 jiwa tenaga kerja bersertifikat kompetensi;
- Dari target 21,00 persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 20,05 persen atau dengan capaian sebesar 93,26 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 96,25 persen. Dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp. 133.132,60 (dalam milyar rupiah) dari 643.368 jiwa tenaga kerja persen.; dan
- Dari target 1.000 orang yang mendapatkan Pelatihan Skill Training Gratis terealisasi sebanyak 962 orang atau dengan capaian sebesar 96,20 persen.

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.875.738.700,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.773.790.580,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan





puluh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 97,37 persen.

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja program ini antara lain:

- Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;
- Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut antara lain adanya Program Strategis Wali Kota "10.000 Skill



Training Gratis" dengan memberikan pelatihan kerja berbasis kompetensi dan pengembangan produktivitas. Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan serta dunia usaha. Akan semakin dipertajam dengan mengirim tenaga magang keluar negeri dan pelatihan bahasa asing. Peserta magang akan melalui proses tes kelayakan di Jakarta, baik tes kompetensi, produktifitas, keterampilan, kesehatan dan penguasaan bahasa asing. Pelatihan dan Sertifikasi ini di harapkan menjadi salah satu upaya mendorong daya saing tenaga kerja lokal sebelum masuk ke dunia kerja.

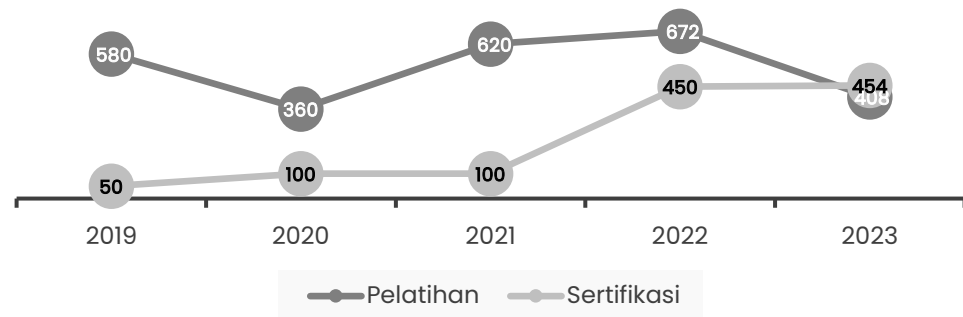
Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.

Pencapaian kinerja di atas juga didorong oleh adanya kerjasama dengan Asean Development Bank (ADB) terkait Job Start dengan memberikan pelatihan hard dan soft skill ke pada pencari kerja.





Grafik 2.1. Perkembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi



Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan akan lebih mendorong LPK (Swasta) binaan untuk memiliki akreditasi, bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan dan mengirim ASN untuk mengikuti diklat Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja.

Tindak Lanjut:

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain:

- Melakukan evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan;
- Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan;
- Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;
- Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk peningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna; dan
- Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP.





4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	55,12%	55,00%	59,04%	98,40%
Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.483 Peluang Kerja	8.640 Peluang Kerja	8.563 Peluang Kerja	99,11%

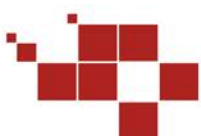
Rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,75 persen atau kategori berkinerja sangat tinggi. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut:

- Dari target 60 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar terealisasi sebesar 59,04 persen atau dengan capaian sebesar 98,40 persen. Dimana dari 5.315 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 3.138 orang; dan
- Dari target 8.640 Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru terealisasi sebanyak 8.563 peluang kerja atau dengan capaian sebesar 99,11 persen.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.2.718.381.410,- (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.597.212.652,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 95,54 persen.

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian kinerja program ini antara lain:

- Dalam penempatan tenaga kerja belum dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya PNS penjabat fungsional pengantar kerja (7 orang);
- Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal dan Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal





masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal; dan

- Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.

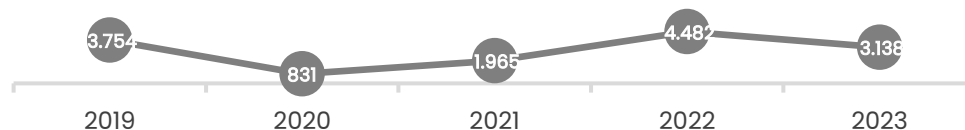
Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan



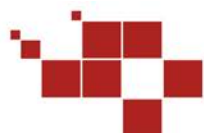
penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar,

pengembangan jejaring informasi pasar kerja, pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. BKK merupakan wadah dalam mempertemukan alumni dengan pencari kerja, sebagai wadah dalam memberikan pelatihan tamatan sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Grafik. 2.2. Penempatan Tenaga Kerja



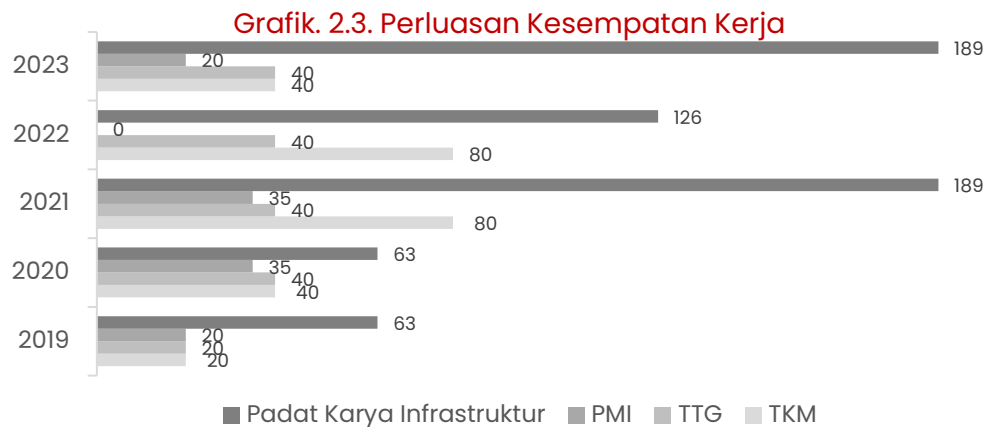
Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Selain itu melalui peningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap teknologi tepat





guna, pengembangan kewirausahaan, serta berbagai keterampilan pendukung lainnya sehingga tenaga kerja mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

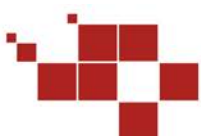
Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga ditunjang oleh terbentuknya Forum Human Resources Development (HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Kota Makassar.



Pencapaian kinerja di atas juga didorong oleh terbentuknya Forum Skill Development Center (SDC) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimana Forum SDC bertujuan untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan bekal pelatihan kepada tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. Selain itu juga menjaring perusahaan industri untuk terlibat secara langsung dalam hal penempatan tenaga kerja.

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapori Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”. Selain itu akan lebih mendorong keberlangsungannya Forum SDC dan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

5. Program Hubungan Industrial





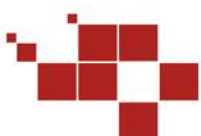
Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	28,62%	33,69%	31,53%	93,58%
Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahun	4,67%	4,81%	4,21%	98,33%
Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	61,38%	69,00%	62,96%	85,09%

Rata-rata capaian kinerja program sebesar 92,33 persen atau kategori berkinerja sangat tinggi. Adapun analisa capaian program di atas sebagai berikut:

- Dari target 33,69 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak terealisasi sebesar 31,53 persen atau dengan capaian sebesar 93,58 persen. Dimana dari 3.194 perusahaan yang berada di Kota Makassar sebanyak 1.007 perusahaan telah menerapkan tata kelola kerja yang layak;
- Dari target 4,14 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial setahun terealisasi 4,21 persen atau dengan capaian sebesar 98,33 persen. Perlu diketahui indikator ini bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Dimana sebanyak 214 kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan dari dari 5084 perusahaan; dan
- Dari target 74 Persen Kasus Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 62,96 persen atau dengan capaian sebesar 85,09 persen. Dimana dari 214 kasus yang dilaporkan sebanyak 134 kasus diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.849.418.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.786.176.161,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 92,55 persen.

Hubungan industrial yang harmonis mendorong terciptanya ketenangan berusaha dan bekerja, peningkatan





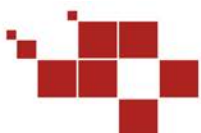
produksi dan produktivitas kerja serta keterampilan tenaga kerja. Hubungan industrial yang baik akan mempermudah setiap pihak mencapai tujuannya. Peningkatan hubungan industrial juga berdampak pada perkembangan perusahaan yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Yang tentunya ini akan membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Hubungan industrial yang kondusif akan mendorong terciptanya stabilitas di sektor kerja dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada keadaan tertentu kepentingan di antara keduanya dapat berbeda, hal ini berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, sarana sarana hubungan industrial sangat diperlukan agar tercipta iklim kerja yang harmonis.

Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial melakukan pembinaan antara lain Serikat Pekerja/Serikat Buruh, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartite dan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Selain itu melakukan pendaftaran dan pemantauan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam menjamin kesejahteraan pekerja melakukan pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) melalui Dewan Pengupahan.

Hubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya. Dengan tidak dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Semua perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit yakni hanya antara kedua belah pihak. Apabila perundingan bipartit gagal maka salah satu atau kedua belah pihak yang sedang berselisih mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan ditawarkan kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan alternatif



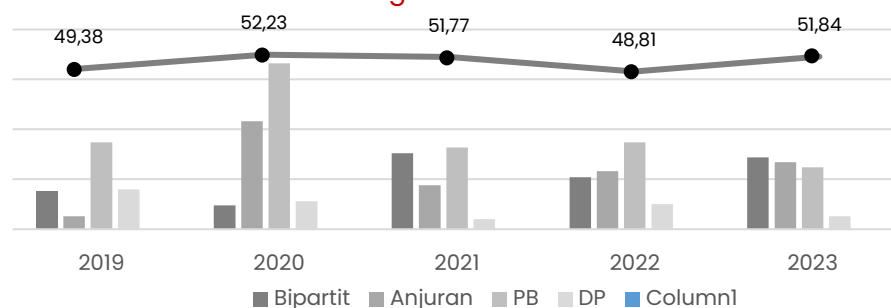


penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila para pihak tersebut memutuskan untuk memilih alternatif mediasi maka penyelesaian perselisihan tersebut dilimpahkan kepada mediator Dinas Ketenagakerjaan dan untuk segera dilaksanakan mediasi. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Makassar.

Kasus sengketa pengusaha-pekerja pada tahun 2023 sebanyak 214 menurun sebanyak minus 8 kasus dimana pada tahun 2022 tercatat sebanyak 222 kasus.

Dari 2023 kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 179 kasus PHK dan 35 kasus perselisihan hak. Sedangkan dalam hal penyelesaian kasus sebanyak 72 kasus diselesaikan secara bipartite, 67 secara anjuran, 62 secara perjanjian bersama dan 13 kasus masih dalam proses mediasi.

Grafik. 2.4. Perkembangan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial



Faktor Penghambat:

Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- Tingginya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran menyebabkan angka sengketa hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja masih tinggi;
- Selain itu, dalam penyelesaian kasus hubungan industrial terjadi peningkatan dengan anjuran (tidak terjadi kesepakatan antara perusahaan dan pekerja yang bersengketa) sehingga





- kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) mengalami penurunan; dan
- Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator.

Faktor Pendukung:

Adapun beberapa faktor pendorong dalam pelaksanaan pencapaian target/kinerja Program Hubungan Industrial tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- Terbentuknya LKS Tripartit yang setiap bulan melakukan rapat kerja terkait isu-isu Ketenagakerjaan;
- Terbentuknya Dewan Pengupahan.

Tindak Lanjut:

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja antara lain :

- Mengoptimalkan komunikasi antara semua pihak yang berkepentingan dan meningkatkan fungsi kaidah-kaidah hukum ketenagakerjaan sebagai rambu-rambunya;
- Penambahan Pejabat Fungsional Mediator.

Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah dicapai di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Realisasi Anggaran Per Program
Tahun Anggaran 2023

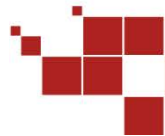
Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capain
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.714.718.462	9.749.748.366	90,99%
Perencanaan Tenaga Kerja	108.599.000	85.322.540	78,57%
Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	3.875.738.700	3.773.790.580	97,37%
Penempatan Tenaga Kerja	2.718.381.410	2.597.212.652	95,54%
Hubungan Industrial	849.418.000	786.176.161	92,55%
TOTAL	18.266.855.572	16.992.250.299	93,02%

Untuk lebih lengkapnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel sesuai format Formulir Tabel E-81 berikut:





02	2.07	04	2.01	04	Penyenggaraan Unit Layanan Efisiensi Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	500 Orang	579.577.120	115	142.566.676	100	69.828.200	100	69.828.200	0	0	0	10.000.000	100	33.989.060	0	19.257.400	100,00	63.246.460	100,00	90,57	215	205.813.136	43,00	35,51	Disnaker		
02	2.07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	915 Orang	2.145.483.756	249	1.154.959.480	180	396.023.380	248	1.885.866.810	0	0	20	85.662.000	20	452.596.300	208	1.285.855.200	248,00	1.824.113.500	100,00	96,73	497	2.979.072.980	54,32	138,85	Disnaker		
02	2.07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penzinan LPTKS yang Terintegrasi	30 Lembaga	310.550.466	6	56.786.096	6	84.638.600	6	69.875.400	0	9.075.600	2	9.000.000	2	9.000.000	2	38.260.848	6	65.336.448	100,00	93,50	12	122.122.544	40,00	39,32	Disnaker		
02	2.07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perzinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah LPTKS yang Mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 Lembaga	227.504.964	6	42.422.888	6	42.453.600	6	42.290.400	0	9.075.600	2	9.000.000	2	9.000.000	2	14.677.848	6	41.753.448	100,00	98,73	12	84.176.336	40,00	37,00	Disnaker		
02	2.07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Mendapatkan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20 Lembaga	83.045.502	4	14.363.208	4	42.185.000	4	27.585.000	0	0	0	0	0	0	0	2	23.583.000	4	23.583.000	100,00	85,49	8	37.946.208	40,00	45,69	Disnaker	
02	2.07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	3.031.203.308	7.361	870.380.604	4.000	453.906.200	4.000	453.579.800	865	18.151.200	1.199	18.000.000	1.093	349.740.000	639	45.737.696	3796,00	431.628.896	94,90	95,16	11.157	1.302.009.500	27,89	42,95	Disnaker		
02	2.07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60 Dokumen	316.496.699	12	47.681.252	12	42.767.600	12	42.604.400	3	9.075.600	3	9.000.000	3	9.000.000	3	14.841.848	12,00	41.917.448	100,00	98,39	24	89.598.700	40,00	28,31	Disnaker		
02	2.07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	1.000.699.896	7.361	217.646.552	4.000	46.109.600	4.000	45.946.400	865	9.075.600	1.199	9.000.000	1093	9.000.000	639	18.667.848	3796,00	46.733.448	94,90	99,54	11157	263.380.000	27,89	26,32	Disnaker		
02	2.07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	5.000 Orang	1.714.006.714	1.704	605.052.800	1.000	365.029.000	1.000	365.029.000	0	0	0	0	0	184	331.740.000	693	12.238.000	877,00	343.978.000	87,70	94,23	2581	949.030.800	51,62	55,37	Disnaker	
02	2.07	04	2.04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	1.200 Orang	1.043.113.786	140	137.870.224	120	97.676.900	70	116.676.900	-	0	-	0	0	20	31.923.200	50	70855300	70	102.778.500	100,00	88,09	210	240.648.724	17,50	23,07	Disnaker	
02	2.07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	800 Orang	559.970.481	100	37.782.940	100	25.310.000	50	25.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker
02	2.07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	400 Orang	483.143.304	40	100.087.284	20	72.366.900	20	91.366.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disnaker
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							98,75	95,54			48,62	62,45	Disnaker				
Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	Disnaker				
02	2.07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	51,01 Persen	4.614.847.000	28,62	1.149.372.242	33,69	1.068.344.400	33,69	849.418.000	0,00	107.093.969	28,62	235.812.100	28,62	130.210.100	31,53	313.059.992	31,53	786.176.161	93,58	92,55	33,69	1.935.548.403	66,05	41,94	DISNAKER		
						Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahunan	2,50 Persen		4,67	4,14	4,14	4,14	4,14	0,00	4,67	4,67	4,21	4,67	4,67	4,21	4,21	4,21	98,33	84,62	4,21	4,21	31,63	70,36					
						Persentase Kasus yang D diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,00 Persen	61,38	61,38	61,38	61,38	61,38	61,38	35,29	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96			
02	2.07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	525 Perusahaan	1.332.331.879	113	552.792.620	105	43.695.700	105	50.622.100	8	891.569	32	2.072.100	37	18.594.100	41	23.407.600	118	44.965.369	112,38	88,83	231	597.757.969	44,00	44,87	Disnaker		
02	2.07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	500 Perusahaan	283.221.159	109	54.853.000	100	1.708.000	100	1.708.000	8	0	31	0	35	1.522.000	38	0	112	1.522.000	112,00	89,11	221	56.375.000	44,20	19,90	Disnaker		
02	2.07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	133.896.405	4	52.380.400	5	1.280.000	5	1.280.000	0	0	1	0	2	0	3	1.154.000	6	1.154.000	120,00	90,16	10	53.534.400	40,00	39,98	Disnaker		
02	2.07	05	2.01	03	Peningkatan Pendataan dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Laporan	915.214.315	12	445.559.220	12	40.707.700	12	47.634.100	3	891.569	3	2.072.100	3	17.072.100	3	22.253.600	12	42.289.369	100,00	88,78	24	487.848.589	40,00	53,30	Disnaker		
02	2.07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.250 Perkara	3.282.515.121	249	596.579.622	260	1.024.648.700	260	798.795.900	20	106.202.400	53	233.740.000	65	111.616.000	-	289.652.392	138	741.210.792	53,08	92,79	387	1.337.790.414	30,96	40,76	Disnaker		
02	2.07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	250 Perkara	622.236.026	52	180.230.800	60	127.582.000	60	99.582.000	7	0	16	93.100.000	18	4.006.000	0	221.000	41	97.327.000	68,33	97,74	93	277.557.800	37,20	44,61	Disnaker		
02	2.07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	1.000 Perkara	1.087.010.870	197	133.957.052	200	174.318.400	200	173.665.600	13	36.302.400	37	36.000.000	47	36.000.000	0	61.041.392	97	169.343.792	48,50	97,51	294	303.300.844	29,40	27,90	Disnaker		
02	2.07	05	2.02	03	Penyenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	166.410.909		28.538.700	12	21.966.000	12	16.766.000	3	0	3	0	3	0	0	16.260.000	9	16.260.000	75,00	96,98	9	44.798.700	15,00	26,92	Disnaker		
02	2.07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 Lembaga	1.071.824.265	3	188.873.170	2	336.630.800	2	162.630.800		33.300.000	1	26.490.000	1	22.200.000		79.500.000	2	161.490.000	100,00	99,30	5	350.363.170	8,33	32,69	Disnaker		
02	2.07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	375 Orang	335.033.052	150	64.979.900	100	364.151.500	100	346.151.500		36.600.000	50	78.150.000	50	49.410.000		132.630.000	100	296.790.000	100,00	85,74	250	361.769.900	66,67	107,98	Disnaker		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							92,18	92,55			56,01	41,94	Disnaker				
Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	Disnaker				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																							96,95	93,02			72,09	34,35	Disnaker				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah	Disnaker				





B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Arah kebijakan dan strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022–2026 disusun untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Sombere Dan Smart City Dengan Imunitas Kuat Untuk Semua” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan serta upaya dalam pencapaian Misi 2 (kedua) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua” pada tujuan 2.2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru. Arah kebijakan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas RPJMD 2022–2026 Kota Makassar yang mencakup bidang ketenagakerjaan

Adapun tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1. Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,04
1.1. Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	52,50
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,00
2. Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif	Angka Sengketa Perusahaan–Pekerja Tahunan	3,66
2.1. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan–Pekerja Tahunan	3,66
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	48,00
3.1. Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	81,00





Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 direncanakan dalam 5 program yang dijabarkan dalam 20 kegiatan dan 55 sub kegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2024, adalah : Rp.24.187.373.870-, (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dimana dari 16 (enam belas) usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 16 (enam belas) usulan kegiatan yang terakomodir.

Realisasi kemajuan belanja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar Rp.7.701.751.160,- (tujuh milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) atau 31,84 persen.

Rata-rata capaian target kinerja 5 program sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar 31,19 persen atau berkinerja sangat rendah

Secara umum, penyebab masih rendahnya capaian target kinerja 5 program adalah hampir semua kegiatan belum waktunya dilaksanakan dan tidak terbayarnya iuran jaminan sosial bagi pekerja rentan selama 2 (dua) bulan. Adapun rincian capaian kinerja 5 program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2023	Tahun 2024		
		Target	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,41%	91,92%	90%	56,76%





Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah)	100,00%	100,00%	100%	50,00%
Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	68,25%	68,25%	90%	52,46%

Adapun analisa capaian program di atas sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:

- Dari target 90 persen Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 56,76 persen. Dimana dari 74 unit sarana da prasarana aparatur yang tersedia sebanyak 42 unit dalam kondisi baik;
- Dari target 100 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar 50,00 persen dimana dari 12 laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 6 laporan; dan
- Dari target 90 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas, terealisasi sebesar 58,29 persen. Dimana dari 61 orang ASN lingkup Dinas Ketenagakerjaan sebanyak 32 orang mendapatkan peningkatan kapasitas.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.10.406.337.920,- (sepuluh milyar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.928.103.090,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) atau sebesar 56,76 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan anggaran kegiatan dalam proses pencairan.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2023	Tahun 2024		
		Target	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	93,33%	96,77%	0,00%	0,00%





Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2024 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 93,55 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja terealisasi sebesar 0 persen. Masih nihilnya capaian disebabkan kegiatan pada program tersebut berada triwulan III.

Program Perencanaan Tenaga Kerja terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.149.040.400,- (seratus empat puluh sembilan juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.570.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau sebesar 21,85 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro di triwulan III; dan

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2023	Tahun 2024		
		Target	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,65%	1,03%	0,62%	60,19%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20,05%	22,00%	20,69%	94,05%
Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	962,00 Orang	1.190 Orang	200,00 Orang	16,81%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2024 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 1,03 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi terealisasi sebesar 0,62 persen, dimana sebanyak 2409 orang tenaga kerja bersertifikat kompetensi dari 387180 orang tenaga kerja keseluruhan;
- Dari target 22,00 persen Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 20,69 persen, dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp. 133.132,60 (dalam milyar rupiah) dari 643.368 jiwa tenaga kerja persen; dan
- Dari target 1.190 Orang Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan terealisasi sebanyak 200 orang.





Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 6 (enam) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.3.203.613.800,- (tiga milyar dua ratus tiga juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.906.048.290,- (sembilan ratus enam juta empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 28,28 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Instruktur;
- Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar; dan
- Keterlambatan proses administrasi pelaksanaan kegiatan.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2023	Tahun 2024		
		Target	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	59,04%	65,00%	26,33%	40,51%
Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.563 Peluang Kerja	9.555 Peluang Kerja	4777,00	49,99%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2024 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 65 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar terealisasi sebesar 26,33 persen atau sebesar 40,51 persen dimana pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1197 orang dari 4547 orang pencari kerja keseluruhan;
- Dari target 9.555 peluang kerja dan bisnis baru terealisasi sebesar 4777 peluang kerja atau sebesar 49,99 persen.

Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 11 (sebelas) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.2.389.181.350,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.246.119.400,-





(dua ratus empat puluh enam juta seratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 10,30 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional pengantar kerja (1 orang pejabat fungsional);
- Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal; dan
- Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal.

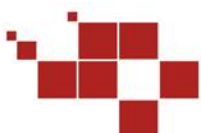
5. Program Hubungan Industrial

Indikator Kinerja	Realisasi Thn 2023	Tahun 2024		
		Target	Realisasi s.d Triwulan II	% Capaian
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	31,53%	38,50%	0,00%	0,00%
Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja (Pertahun)	4,21%	3,66%	0,00%	0,00%
Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	62,96%	79,00%	60,44%	76,51%

Dimana sampai dengan Triwulan II tahun 2024 target capaian kinerja program sebagai berikut:

- Dari target 38,50 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak belum ada realisasi karena perhitungan indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun;
- Dari target 3,66 persen Angka sengketa perselisihan hubungan industrial pertahun belum ada realisasi karena perhitungan indikator ini baru dilaksanakan pada akhir tahun
- Dari target 79 persen kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terealisasi sebesar 60,44 persen atau sebesar 76,51 persen dimana dari 91 kasus hubungan industrial yang dilaporkan sebanyak 55 kasus diselesaikan secara Perjanjian Bersama (PB).

Program Hubungan Industrial terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran dari APBD sebesar Rp.8.039.200.400,- (delapan milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu empat



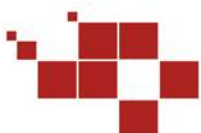


ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.588.910.380,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 19,76 persen.

Adapun faktor penghambat sebagai berikut:

- Masih terbatasnya PNS penjabat fungsional mediator;
- Untuk pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan verifikasi data sedang dilaksanakan oleh Dinas Catatan Sipil; dan
- Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dan anggaran kegiatan dalam proses pencairan.

Untuk lebih jelasnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel sesuai format Formulir Tabel T-E.81 berikut:



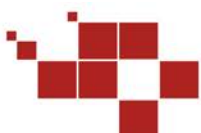


Untuk capaian Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2021-2026 sampai dengan triwulan I Tahun 2024 (merupakan tahun ketiga periode RENSTRA) rata-rata capaian kinerja sebesar 58,51 persen hal ini disebabkan kegiatan yang menunjang indikator kinerja program secara langsung belum waktunya dilaksanakan.

Adapun perkiraan realisasi capaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tingkat capaian realisasi target kinerja sebesar 83,42 persen;
2. Tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 58,31 persen;
3. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 3 program, yang telah memenuhi target sebanyak 2 program dan melebihi target sebanyak 0 program;
4. Realisasi kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 19 kegiatan, yang telah memenuhi target kinerja sebanyak 1 kegiatan dan melebihi target sebanyak 0 kegiatan;
5. Realisasi sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 59 sub kegiatan, yang telah memenuhi target kinerja sebanyak 1 sub kegiatan dan melebihi target sebanyak 0 kegiatan;

Adapun rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel sesuai format Formulir Tabel T-C.29 berikut





TABEL 2.5 (FORMAT T-C.29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

Evaluasi Pelaksanaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
			4		5		6		7		8 = 7/6 x 100%		9		10 = 9 + 7		11 = 10/4 x 100%					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
02			URUSAN WAJIB																			
02	2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																			
02	2.07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90 Persen	66.549.824.200	91,92	9.964.018.995	90,00	10.714.718.462	91,92	9.749.748.366	102,13	14,65	90	24.187.373.870	90	58.875.767.242	83,42	58,31		
				Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		100,00		100,00		100,00			100		100		100,00		100,00		
				Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Persen		88,52		90,00		88,52		98,36		90		90		100,00			
02	2.07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67 Dokumen	1.558.610.628	13	182.407.750	8	70.640.000	8	66.593.000	11,94	4,27	12	131.310.300	33,00	380.311.050	49,25	24,40	
02	2.07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	791.358.540	2	57.827.650	2	61.736.000	2	59.000.000	16,67	7,46	2	109.159.000	6,00	225.986.650	50,00	28,56
02	2.07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	49.643.596	1	7.510.000	1	2.176.000	1	1.872.000	20,00	3,77	1	5.377.000	3,00	14.759.000	60,00	29,73
02	2.07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	46.569.705	1	8.575.000	1	2.176.000	1	1.872.000	20,00	4,02	1	3.899.400	3,00	14.346.400	60,00	30,81
02	2.07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	44.890.114	1	6.808.000	1	2.636.000	1	2.230.000	20,00	4,97	1	2.429.800	3,00	11.467.800	60,00	25,55
02	2.07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	42.013.201	1	6.560.000	1	1.724.000	1	1.430.000	20,00	3,40	1	1.769.800	3,00	9.759.800	60,00	23,23
02	2.07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Dokumen	541.904.462	5	89.084.500	-	-	-	-	-	4	5.286.300	9,00	94.370.800	36,00	17,41	
02	2.07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.231.009	2	6.042.600	2	192.000	2	189.000	20,00	0,45	2	3.389.000	6,00	9.620.600	60,00	22,78
02	2.07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	240 Dokumen	45.333.869.754	48	6.579.946.435	36	7.367.917.235	36	6.731.148.693	15,00	14,85	12	7.328.002.636	96,00	20.639.097.764	40,00	45,53	
02	2.07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	305 Orang/Bulan	43.046.749.849	61	6.167.814.035	61	6.983.197.235	61	6.350.028.693	20,00	14,75	62	6.882.537.436	184,00	19.400.380.164	60,33	45,07
02	2.07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	1.337.997.801	12	229.360.000	12	240.720.000	12	237.120.000	20,00	17,72	12	265.320.000	36,00	731.800.000	60,00	54,69
02	2.07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	746.442.288	12	144.000.000	12	144.000.000	12	144.000.000	20,00	19,29	12	144.145.200	36,00	432.145.200	60,00	57,89
02	2.07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60 Laporan	202.679.816	12	38.772.400	0	0	-	-	-	12	36.000.000	24,00	74.772.400	40,00	36,89	
02	2.07	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	60 Dokumen	735.931.340	12	124.111.680	12	142.938.800	12	123.434.820	20,00	16,77	12	181.681.200	36,00	429.227.700	60,00	58,32	
02	2.07	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Dokumen	424.788.769	12	63.616.752	12	82.951.200	12	63.576.648	20,00	14,97	12	82.735.200	36,00	209.928.600	60,00	49,42
02	2.07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	311.142.572	12	60.494.928	12	59.987.600	12	59.858.172	20,00	19,24	12	98.946.000	36,00	219.299.100	60,00	70,48
02	2.07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Dokumen	1.644.290.162	12	142.252.428	12	210.243.600	12	191.258.486	20,00	11,63	12	332.946.000	36,00	666.456.914	60,00	40,53	
02	2.07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	548 Paket	427.458.285	108	63.070.000	110	75.000.000	110	73.600.000	20,07	17,22	-	-	218,00	136.670.000	39,78	31,97
02	2.07	01	2.05	03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	312.695.296	12	60.550.428	12	60.243.600	12	59.354.172	20,00	18,98	12	98.946.000	36,00	218.850.600	60,00	69,99
02	2.07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	69 Orang	780.000.000	2	18.632.000	10	75.000.000	10	58.304.314	14,49	7,47	10	234.000.000	22,00	310.936.314	31,88	39,86
02	2.07	01	2.05	10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	124.136.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	



02	2.07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	35 Jenis	5.775.451.212	7	702.242.712	7	1.147.232.780	7	1.108.168.363	20,00	19,19	7	902.382.900	21,00	2.712.793.975	60,00	46,97
02	2.07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	63.252.683	1	10.415.000	1	12.687.100	1	10.595.500	20,00	16,75	1	13.312.800	3,00	34.323.300	60,00	54,26
02	2.07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	432.256.379	4	68.242.000	5	78.695.300	5	67.306.700	20,00	15,57	5	75.977.200	14,00	211.525.900	56,00	48,94
02	2.07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	391.899.942	2	67.138.100	3	77.430.380	3	71.079.100	20,00	18,14	2	76.827.300	7,00	215.044.500	46,67	54,87
02	2.07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	186.007.458	2	22.330.000	2	39.620.000	2	34.720.000	20,00	18,67	2	22.665.600	6,00	79.715.600	60,00	42,86
02	2.07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	100.473.750	12	16.320.000	12	19.500.000	12	16.240.000	20,00	16,16	12	26.100.000	36,00	58.660.000	60,00	58,38
02	2.07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	2.956.315.000	12	469.397.612	12	474.500.000	12	469.327.063	20,00	15,88	12	483.500.000	36,00	1.422.224.675	60,00	48,11
02	2.07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60 Dokumen	1.645.246.000	12	48.400.000	12	444.800.000	12	438.900.000	20,00	26,68	12	204.000.000	36,00	691.300.000	60,00	42,02
02	2.07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358 Unit	4.085.244.492	120	1.398.284.901	64	354.249.750	64	298.477.350	17,88	7,31	25	356.233.000	209,00	2.052.995.251	58,38	50,25
02	2.07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 Unit	1.270.400.000	49	457.774.591	29	178.872.000	29	171.550.000	19,33	13,50	16	226.000.000	94,00	855.324.591	62,67	67,33
02	2.07	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	200 Unit	2.214.844.492	69	848.941.750	35	175.377.750	35	126.927.350	17,50	5,73	9	130.233.000	113,00	1.106.102.100	56,50	49,94
02	2.07	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	8 Unit	600.000.000	2	91.568.560	0	-	0	-	-	-	0	0	2,00	91.568.560	25,00	15,26
02	2.07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Laporan	4.004.302.422	72	453.986.009	36	751.591.447	36	665.711.254	20,00	16,62	36	732.942.884	144,00	1.852.640.147	80,00	46,27
02	2.07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	938.622.398	12	178.989.384	12	200.172.000	12	191.438.105	20,00	20,40	12	158.313.600	36,00	528.741.089	60,00	56,33
02	2.07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.713.496.365	12	246.874.625	12	252.963.947	12	199.901.503	20,00	11,67	12	337.331.684	36,00	784.107.812	60,00	45,76
02	2.07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	1.352.183.660	12	28.122.000	12	298.455.500	12	274.371.646	20,00	20,29	12	237.297.600	36,00	539.791.246	60,00	39,92
02	2.07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	243 Unit	3.412.124.190	46	380.787.080	63	669.904.850	63	564.956.400	25,93	16,56	74	440.839.000	183,00	1.386.582.480	75,31	40,64
02	2.07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	249.299.292	1	32.024.600	1	47.411.250	1	43.034.100	20,00	17,26	1	44.380.000	3,00	119.438.700	60,00	47,91
02	2.07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	1.724.233.340	15	126.690.150	15	286.142.600	15	210.196.700	18,75	12,19	17	254.173.000	47,00	591.059.850	58,75	34,28
02	2.07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	237.669.540	29	34.423.100	46	46.050.000	46	41.447.500	30,67	17,44	55	36.950.000	130,00	112.820.600	86,67	47,47
02	2.07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
02	2.07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	1.050.922.019	1	187.649.230	1	290.301.000	1	270.278.100	20,00	25,72	1	105.336.000	3,00	563.263.330	60,00	53,60
02	2.07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	96,77 Persen	636.233.000	93,33	224.904.165	93,55	108.599.000	93,33	85.322.540	96,45	13,41	96,77	149.040.400	96,77	459.267.105	100,00	72,19
02	2.07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	5 Dokumen	636.233.000	1	224.904.165	1	108.599.000	1	85.322.540	20,00	13,41	1	149.040.400	3,00	459.267.105	60,00	72,19
02	2.07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	5 Dokumen	471.897.366	1	125.714.965	1	41.857.000	1	24.460.540	20,00	5,18	1	111.507.200	3,00	261.682.705	60,00	55,45
02	2.07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	500 Perusahaan	164.335.634	150	99.189.200	50	66.742.000	50	60.862.000	10,00	37,04	50	37.533.200	250,00	197.584.400	50,00	120,23
02	2.07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	1,20 Persen	20.134.599.650	0,53	3.307.805.025	0,70	3.875.738.700	0,65	3.773.790.580	53,76	18,74	1,03	3.203.613.800	1,03	10.285.209.405	85,83	51,08
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	23,00 Persen	20,05	21,50	20,05	87,17	22,00	95,65									
						Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	5.690 Orang	1.122	1.000	962	16,91	1.190	57,54									
02	2.07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarakan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	2.800 Orang	11.068.673.234	532	1.362.066.799	336	1.841.958.500	336	1.781.472.348	12,00	16,09	240	1.132.128.300	1.108,00	4.275.667.447	39,57	38,63
02	2.07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	2.800 Orang	10.123.339.130	532	1.194.177.349	336	1.817.743.000	336	1.758.391.723	12,00	17,37	240	1.123.615.300	1.108,00	4.076.184.372	39,57	40,27
02	2.07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	750 Lembaga	945.334.104	180	167.889.450	50	24.215.500	50	23.080.625	6,67	2,44	50	8.513.000	280,00	199.483.075	37,33	21,10



02	2.07	03	2.02		Bimbingan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	400 Lembaga	492.061.325	80	111.718.792	80	129.546.000	80	123.260.000	20,00	25,05	80	34.813.400	240,00	269.792.192	60,00	54,83
02	2.07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	400 Lembaga	492.061.325	80	111.718.792	80	129.546.000	80	123.260.000	20,00	25,05	80	34.813.400	240,00	269.792.192	60,00	54,83
02	2.07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	120 Perizinan	1.265.515.343	12	142.671.834	24	198.947.600	24	182.020.992	20	14,38	12	214.774.300	48,00	539.467.126	40,00	42,63
02	2.07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	120 Perizinan	1.265.515.343	12	142.671.834	24	198.947.600	24	182.020.992	20	14,38	12	214.774.300	48,00	539.467.126	40,00	42,63
02	2.07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	1.250 Perusahaan	2.207.533.361	250	451.065.800	300	511.200.000	300	503.748.240	24,00	22,82	90	399.285.300	640,00	1.354.099.340	51,20	61,34
02	2.07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	1.250 Perusahaan	2.207.533.361	250	451.065.800	300	511.200.000	300	503.748.240	24,00	22,82	90	399.285.300	640,00	1.354.099.340	51,20	61,34
02	2.07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5 Dokumen	5.100.816.387	1	1.240.281.800	1	1.194.086.600	1	1.183.289.000	20,00	23,20	1	1.422.612.500	3,00	3.846.183.300	60,00	75,40
02	2.07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5 Dokumen	5.100.816.387	1	1.240.281.800	1	1.194.086.600	1	1.183.289.000	20,00	23,20	1	1.422.612.500	3,00	3.846.183.300	60,00	75,40
02	2.07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	75,00 Persen	9.042.923.150	53,46	3.050.042.646	60,00	2.718.381.410	59,04	2.597.212.652	78,72	28,72	65,00	2.389.181.350	65,00	8.036.436.648	86,67	88,87
02	2.07	04				Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru	46,240 Peluang	8.483	8.640	8.563	18,52	9.555	26,601	57,53								
02	2.07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitas Layanan	15.915 Orang	4.658.055.590	3.864	1.985.005.722	3.948	2.078.249.310	3.905	1.997.468.808	24,54	42,88	3.713	1.636.284.150	11.482,00	5.618.758.680	72,15	120,62
02	2.07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	120 Orang	140.000.000	0	0	30	1.371.000	0	794000	0	0,5671429	-	-	-	794.000	-	0,57
02	2.07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	14.000 Orang	1.581.271.686	3.400	646.716.626	3.500	95.914.300	3.457	86.543.848	24,69	5,47	3500	144.946.400	10.357,00	878.206.874	73,98	55,54
02	2.07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500 Orang	211.723.027	100	40.762.940	100	25.269.000	100	22.771.000	20,00	10,76	0	-	200,00	63.533.940	40,00	30,01
02	2.07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	500 Orang	579.577.120	115	142.566.676	100	69.828.200	100	63.246.460	20,00	10,91	30	235.120.000	245,00	440.933.136	49,00	76,08
02	2.07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	915 Orang	2.145.483.756	249	1.154.959.480	248	1.885.866.810	248	1.824.113.500	27,10	85,02	183	1.256.217.750	680,00	4.235.290.730	74,32	197,40
02	2.07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	30 Lembaga	310.550.466	6	56.786.096	6	69.875.400	6	65.336.448	20,00	21,04	6	41.499.200	18,00	163.621.744	60,00	52,69
02	2.07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	30 Lembaga	227.504.964	6	42.422.888	6	42.290.400	6	41.753.448	20,00	18,35	6	41.499.200	18,00	125.675.536	60,00	55,24
02	2.07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	20 Lembaga	83.045.502	4	14.363.208	4	27.585.000	4	23.583.000	20,00	28,40	0	-	8,00	37.946.208	40,00	45,69
02	2.07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	3.031.203.308	7.361	870.380.604	4.000	453.579.800	3.796	431.628.896	9,49	14,24	4.000	489.322.000	15.157,00	1.791.331.500	37,89	59,10
02	2.07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	60 Dokumen	316.496.699	12	47.681.252	12	42.604.400	12	41.917.448	20,00	13,24	12	60.328.000	36,00	149.926.700	60,00	47,37
02	2.07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40.000 Orang	1.000.699.896	7.361	217.646.552	4.000	45.946.400	3.796	45.733.448	9,49	4,57	4.000	43.766.800	15.157,00	307.146.800	37,89	30,69
02	2.07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5.000 Orang	1.714.006.714	1.704	605.052.800	1.000	365.029.000	877	343.978.000	17,54	20,07	500	385.227.200	3.081,00	1.334.258.000	61,62	77,84
02	2.07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	1.200 Orang	1.043.113.786	140	137.870.224	70	116.676.900	140	102.778.500	11,67	9,85	40	222.076.000	320,00	462.724.724	26,67	44,36
02	2.07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	800 Orang	559.970.481	100	37.782.940	50	25.310.000	50	23.107.500	6,25	4,13	0	-	150,00	60.890.440	18,75	10,87
02	2.07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	400 Orang	483.143.304	40	100.087.284	20	91.366.900	20	79.671.000	5,00	16,49	40	222.076.000	100,00	401.834.284	25,00	83,17
02	2.07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	51,01 Persen	4.614.847.000	28,62	1.149.372.242	33,69	849.418.000	31,53	786.176.161	61,81	17,04	38,50	8.039.200.400	38,50	9.974.748.803	75,48	216,14
						Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Tahun	2,50 Persen	4,67	4,14	4,21	98,33	3,66	53,60									
						Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,00 Persen	61,38	74,00	62,62	70,36	79,00	88,76									
02	2.07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	525 Perusahaan	1.332.331.879	113	552.792.620	105	50.622.100	118	44.965.369	22,48	3,37	105	51.223.300	336,00	648.981.289	64,00	48,71



02	2.07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	500 Perusahaan	283.221.159	109	54.853.000	100	1.708.000	112	1.522.000	22,40	0,54	100	1.024.800	321,00	57.399.800	64,20	20,27
02	2.07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 Perusahaan	133.896.405	4	52.380.400	5	1.280.000	6	1.154.000	24,00	0,86	5	868.700	15,00	54.403.100	60,00	40,63
02	2.07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Laporan	915.214.315	12	445.559.220	12	47.634.100	12	42.289.369	20,00	4,62	12	49.329.800	36,00	537.178.389	60,00	58,69
02	2.07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.250 Perkara	3.282.515.121	249	596.579.622	260	798.795.900	138	741.210.792	11,04	22,58	260	7.987.977.100	647,00	9.325.767.514	51,76	284,10
02	2.07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	250 Perkara	622.236.026	52	180.230.800	60	99.582.000	41	97.327.000	16,40	15,64	60	77.126.300	153,00	354.684.100	61,20	57,00
02	2.07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	1.000 Perkara	1.087.010.870	197	133.957.052	200	173.665.600	97	169.343.792	9,70	15,58	200	198.663.600	494,00	501.964.444	49,40	46,18
02	2.07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	60 Asosiasi dan Serikat Pekerja	166.410.909		28.538.700	12	16.766.000	9	16.260.000	15,00	9,77	12	9.861.200	21,00	54.659.900	35,00	32,85
02	2.07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60 Lembaga	1.071.824.265	3	188.873.170	2	162.630.800	2	161.490.000	3,33	15,07	2	250.299.300	7,00	600.662.470	11,67	56,04
02	2.07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	375 Orang	335.033.052	150	64.979.900	100	346.151.500	100	296.790.000	26,67	88,59	35.782	7.452.026.700	36.032,00	7.813.796.600	9.608,53	2.332,25





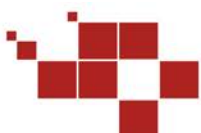
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 terdiri dari 5 indikator sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja;
2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi;
3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan);
5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota.

Untuk bidang urusan tenaga kerja termasuk urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sampai dengan Triwulan II Pada Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar melakukan evaluasi kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada tabel sesuai format T-C.30 berikut:





Tabel 2.6 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan
Kota Makassar Sampai Dengan Tahun 2024

No.	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK Tahun 2026	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-	✓	67,35	93,55	93,55	96,77	67,35	93,33	93,33	96,77
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-	✓	0,41	0,58	0,70	1,03	0,41	0,53	0,65	1,03
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	✓	20,05	21,00	21,50	22,00	20,05	20,69	20,05	22,00
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	-	✓	28,62	29,84	33,69	38,50	28,62	30,75	31,53	38,50
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	-	✓	50,00	55,00	60,00	65,00	53,46	58,32	59,04	65,00





Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dengan jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 93,33 persen dari target 93,55 persen kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja atau dengan capaian sebesar 99,77 persen. Dimana dari 30 jumlah kegiatan keseluruhan berdasarkan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) yang dilaksanakan sebanyak 28 kegiatan.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 0,65 persen dari target 0,70 persen Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi atau dengan capaian sebesar 92,17 persen. Dimana dari 387.180 jiwa tenaga kerja sebanyak 24.98 jiwa tenaga kerja bersertifikat kompetensi.

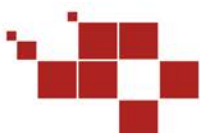
3. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja

Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja adalah perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (harga konstan) (Miliar Rupiah) terhadap jumlah penduduk yang bekerja.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 20,65 persen dari target 21,00 persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja atau dengan capaian sebesar 93,26 persen atau dengan tingkat capaian sebesar 96,25 persen. Dimana PDRB dengan harga konstan sebesar Rp.133.132,60 (dalam milyar rupiah) dari 643.368 jiwa tenaga kerja persen.

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan





terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) terhadap jumlah perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 31,53 persen dari target 33,69 persen Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak atau dengan capaian sebesar 93,58 persen. Dimana dari 3.194 perusahaan yang wajib menerapkan PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.007 telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (terpenuhi 4 unsur)

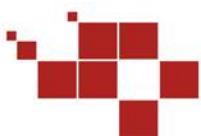
5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang ditempatkan terhadap jumlah mencari kerja melalui mekanisme layanan antar kerja.

Realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 59,04 persen dari target 60,00 persen Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kota atau dengan capaian sebesar 98,40 persen. Dimana dari 5.315 orang pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 3.138 orang.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETENAGAKERJAAN

Bidang ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri atau bebas nilai dari berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kontrol atau kewenangan Dinas Ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan merupakan muara dari berbagai bidang. Setiap kebijakan di berbagai bidang ini akan berpengaruh terhadap bidang ketenagakerjaan. Bila tidak dapat dikatakan semua, maka bidang-bidang yang dipandang mempunyai pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap bidang ketenagakerjaan adalah: (a) Politik dan hukum, (b) Ekonomi, (c) Kependudukan, (d) Globalisasi, (e) Persepsi terhadap pasar kerja, (f) Budaya





perusahaan, (g) Budaya pekerja, (i) Budaya pemerintah dan (h) Otonomi daerah.

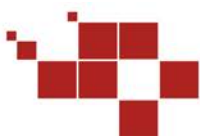
Berdasarkan permasalahan pengangguran, maka dapat digambarkan perumusan isu strategis ketenagakerjaan :

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia
2. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan
3. Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholders, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

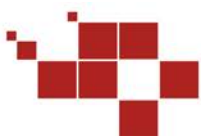
Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan, kota Makassar menjadi destinasi utama bagi siapapun yang ingin memperbaiki kondisi ekonominya. Bukan hanya masyarakat Sulawesi Selatan, tapi sebagian dari mereka berasal dari provinsi lain yang sedang mengupayakan sebuah kehidupan lebih yang baik di kota Makassar. Wajar jika pasar tenaga kerja di kota Makassar setiap tahunnya dipenuhi para pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, tahun 2023 sebanyak 1.110.014 jiwa penduduk berumur 15





tahun ke atas bermukim di Kota Makassar, jumlah itu setara dengan 16,00 persen dari total populasi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk sebanyak ini, sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja.

Kota Makassar sebagai salah daerah yang jumlah angkatan kerjanya terbesar di Sulawesi Selatan diposisikan akan mengalami bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk produktif (berusia 15-64 tahun) mendominasi populasi. Bonus demografi menjadi dasar meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM. Saat tingkat fertilitas turun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia sebagai modal pembangunan. Di saat yang sama, jumlah anak yang sedikit akan memberi peluang bagi kaum perempuan untuk masuk pasar kerja. Bonus demografi akan menjadi windows of opportunity bila disokong oleh SDM yang berkualitas. Jika jumlah penduduk produktif yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi, maka hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di masa depan. Namun bonus demografi menjadi windows of disaster jika sebagian besar penduduk usia produktif berpendidikan rendah atau bahkan tak lulus pendidikan SMP atau SMA, lalu penduduk usia produktif yang banyak jumlahnya itu tidak bisa dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja, sehingga menimbulkan efek sosial yang buruk dan hilangnya momentum untuk mengumpulkan kesejahteraan. Momentum ini jika tidak dimanfaatkan oleh Kota Makassar akan menjadi ancaman apabila bonus demografi hanya diukur dari struktur demografi (kuantitas) semata. Untuk itu, pengembangan SDM menjadi salah satu pilar untuk meningkatkan nilai tambah. Terlebih bila dikaitkan dengan potensi Kota Makassar sebagai salah satu pusat ekonomi utama untuk wilayah Indonesia Timur. Penanaman investasi baru maupun pemindahan investasi ke Kota Makassar akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi atau keterampilan baru. Dunia usaha umumnya akan melaksanakan re-engineering dan re-structuring di segala bidang untuk

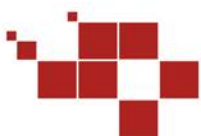




menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan. Akibatnya akan terjadi perubahan terhadap posisi permintaan (supply) dan penawaran (demand) tenaga kerja, struktur persyaratan jabatan maupun kompetensi kerja. Mengacu pada potensi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia Timur, maka sektor-sektor industri yang diperkirakan akan banyak berkembang dan membutuhkan tenaga kerja diantaranya adalah sektor migas (olahan mineral), industri olahan (manufaktur), jasa dan perdagangan, hotel/restoran, dan industri olahan hasil-hasil pertanian. Tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya untuk mengisi peluang tenaga semi skill dan full skill, baik untuk tingkat profesional/manajerial maupun teknisi/operator.

Beralih pada kondisi ketenagakerjaan di Kota Makassar berdasarkan hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 kota Makassar memiliki 651.832 jiwa angkatan kerja, berkurang sebanyak minus 77.803 jiwa (minus 10,66 persen) dibandingkan tahun 2022. Banyaknya angkatan kerja di Kota Makassar dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kenaikan angkatan kerja membuat pasar tenaga kerja kota Makassar relatif lebih dinamis, yang berarti pengusaha dapat mencari pekerja dengan upah lebih kompetitif. Namun, kondisi ini bisa berdampak buruk terhadap bertambahnya jumlah dan tingkat pengangguran terbuka jika sektor-sektor ekonomi produktif tidak mampu menampung para pencari kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja di kota Makassar tahun 2023, sebanyak 582.708 jiwa sudah mendapatkan pekerjaan berkurang sebanyak minus 60.660 jiwa (minus 9,43 persen) dibandingkan tahun 2022, sementara yang belum mendapat pekerjaan mencapai 69.124 jiwa, berkurang sebanyak minus 17.143 jiwa (minus 19,87 persen). Angka tersebut mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) kota Makassar menurun dari 11,82 persen di tahun 2022, menjadi 10,60 persen di tahun 2023. Angka tersebut menjadikan kota Makassar sebagai daerah dengan jumlah pengangguran dan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan.

Adapun perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:





Tabel 2.7
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Makassar
Tahun 2019-2023

URAIAN	SAT	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk Usia Kerja	Jiwa	1.144.563	1.199.282	1.215.200	1.230.996	1.110.014
Angkatan Kerja		661.226	696.158	725.529	729.635	651.832
- Bekerja		592.517	585.325	629.933	643.368	582.708
- Penganggur		68.709	110.833	95.596	86.267	69.124
Bukan Angkatan Kerja		483.337	503.124	489.671	501.361	458.182
- Sekolah		155.016	156.172	130.671	151.801	458.182
- Mengurus Rumah Tangga		267.847	280.399	267.390	280.306	
- Lainnya		60.474	66.553	91.610	69.254	
TPT		10,39%	15,92%	13,18%	11,82%	10,60%
TPAK		57,77%	58,05%	59,70%	59,27%	58,72%

Dalam struktur perekonomian kota Makassar, ada tiga lapangan usaha dominan yaitu sector perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sector industri pengolahan, serta sector konstruksi. Tahun 2023, ketiga sector ini masing-masing berkontribusi 19,67 persen, 18,01 persen, dan 16,73 persen terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi. Artinya, boleh dikatakan bahwa ketiga sector ini menjadi penggerak aktivitas produksi barang dan jasa di kota Makassar. Sayangnya, kinerja sector industri setiap tahun menunjukkan pelambatan, padahal elastisitas tenaga kerja sector ini diatas 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya tumbuh 1 (satu) persen, daya serap tenaga kerjanya lebih dari 1 (satu) persen.

Selain itu, BPS kota Makassar mencatat pertumbuhan nilai tambah industri pengolahan hanya 0,24 persen di tahun 2023, padahal beberapa tahun sebelumnya sempat tumbuh 7-8 persen pertahun. Meskipun terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa terjadi pergeseran struktur ekonomi dari industri ke jasa, tapi menurunnya pertumbuhan dan kontribusi industri pengolahan dan kemudian naiknya peran dan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dapat menjadi gejala yang mesti diwaspadai pemerintah daerah. Empat tahun lalu, perdagangan besar hanya menyumbang 18,96% terhadap struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pertumbuhan sebesar 7,58 persen. Tapi tahun 2023, sector ini berkontribusi 19,82 persen dan pertumbuhannya mencapai



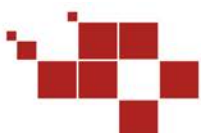


11,79 persen. Pemerintah daerah perlu waspada, karena elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan besar lebih kecil dari 1 (satu) persen. Artinya ketika nilai tambahnya naik 1 (satu) persen, penyerapan tenaga kerjanya hanya tumbuh di bawah 1 (satu) persen.

Pergeseran struktur ekonomi membuat perumusan kebijakan mengatasi pengangguran menjadi sulit. Membesarnya peran sektor perdagangan besar di satu sisi baik dampaknya bagi perekonomian daerah lantaran menghasilkan nilai tambah lebih besar dari sektor lain, termasuk industri. Artinya, jika pemerintah daerah pro terhadap pertumbuhan ekonomi, maka mendorong sektor perdagangan besar merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan, meskipun dengan catatan angka penyerapan tenaga kerjanya rendah. Namun, jika sebaliknya, pemerintah daerah concern terhadap penurunan pengangguran, maka harusnya lebih fokus pada kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dalam menentukan isu-isu strategis ini dengan menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunitites and Threats) dilakukan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan melihat lingkungan bisnis secara internal dan eksternal pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Berikut hasil dari analisis:





Tabel 2.8
Analisa SWOT dalam Penentuan Isu-Isu Strategis
Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar

<p>Strength</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang mendukung; • Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan 10.000 skill training gratis dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja/bisnis baru selama 5 (lima) tahun; • Tersedia sistem Informasi Pasar Kerja; dan • Terbentuknya Forum HRD, Bursa Kerja Khusus (BKK), UP3, Dewan Tripartit, Dewan Pengupahan, LPK Binaan 	<p>Weaknesses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Pejabat Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dibandingkan dengan layanan yang diberikan (jumlah perusahaan di Kota Makassar, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk angkatan kerja); • Belum tersedianya database Ketenagakerjaan yang realtime; • Keterbatasan anggaran; dan • Masih kurangnya sinkronisasi antar OPD dalam melaksanakan kegiatan lintas sektoral.
<p>Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar yang tinggi; • Kota Makassar sebagai Kota Pendidikan dan Kota Jasa; • Jumlah Angkatan Kerja usia Produktif yang tinggi; dan • Kerjasama sama dengan ADB dalam Program Jobstrat, BLKI Kementerian Ketenagakerjaan RI, dengan asosiasi pengusaha dalam pemagangan, Kerjasama dengan Pemerintah Jepang dalam Pemagangan Luar Negeri (Jepang). 	<p>Threats</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonus demografi apabila tidak dapat dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan kerja atau tidak dapat diserap oleh lapangan kerja akibat kurangnya SDM Tenaga Kerja; • Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar tidak diiringi oleh elastisitas penyerapan kesempatan kerja;; • Masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk wajib lapor Ketenagakerjaan; • Investasi di Kota Makassar masih merupakan padat modal bukan padat karya; • Urbanisasi yang tidak diikuti oleh SDM yang siap bersaing; dan • Masih tingginya Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja

Dari hasil analisis SWOT tersebut juga kemudian dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai strategi perencanaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sebagai berikut.

1. Strength and Opportunities (SO)

Memanfaatkan Informasi lowongan kerja secara akurat dan terpercaya, sehingga dapat memberikan daya tarik para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam





mewujudkan 10.000 skill training gratis dan kemudahan akses 100.000 peluang kerja/bisnis baru selama 5 (lima) tahun, kerjasama sama dengan stakeholder dan keterlibatan dunia pendidikan serta dunia usaha dalam menciptakan tenaga kerja trampil yang dapat berdaya saing dalam penyerapan kesempatan kerja di Kota Makassar.

2. Strength and Threats (ST)

Memberikan pemahaman dan meningkatkan pemantauan pada perusahaan yang ada di Kota Makassar dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang terampil untuk dapat memberikan kesadaran wajib lapor. Meningkatkan informasi lowongan kerja yang akan memberikan minat atau kepercayaan kepada pencari kerja. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat terserap dalam lapangan kerja yang tersedia.

3. Weaknesses and Opportunities (WO)

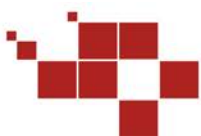
Menambah jumlah Sumber Daya Manusia yang terampil pada setiap bidang dan membuat aplikasi database Ketenagakerjaan yang realtime (SARRING) untuk memperlancar proses bisnis Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan memudahkan pencari kerja dan penyedia kerja dapat berinteraksi secara langsung secara online.

4. Weaknesses and Threats (WT)

Menambah jumlah pejabat fungsional Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan Ketenagakerjaan. Menyusun regulasi untuk lebih memperketat dalam pengawasan wajib lapor Ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja lokal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

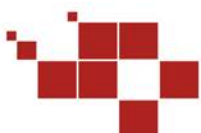
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar berdasarkan RKPD Kota Makassar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kota Makassar.





Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Adapun rancangan awal usulan RKPD tahun 2025 sebesar Rp.21.236.462.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, setelah proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dimana antara rumusan kegiatan dalam rancangan awal RKPD kesemuanya terdapat dalam rancangan RENJA SKPD. Pada rancangan akhir usulan RKPD tahun 2025 sebesar Rp.14.144.800.000,- (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana disajikan pada tabel dengan format formulir T-C.31 berikut:





TABEL 2.8 (T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA MAKASSAR

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

Lembar.....dari.....

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING			
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA				
					(Rp)					(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
02	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
02	07	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90 Persen	13.995.889.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90 Persen	10.702.071.376	
						Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen				Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen		
						Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Persen				Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90 Persen		
02	07	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	301.090.846	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	98.065.000	
02	07	01	01	01	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	141.880.522	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	61.260.000	
02	07	01	01	02	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.160.239	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.345.000	
02	07	01	01	03	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.531.126	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.920.000	
02	07	01	01	04	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.504.603	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.105.000	
02	07	01	01	05	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.915.804	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.105.000	
02	07	01	01	06	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	112.455.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	7.130.000	
02	07	01	01	07	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.643.152	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.200.000	
02	07	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48 Dokumen	9.711.834.564	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48 Dokumen	8.942.428.612	
02	07	01	02	01	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	9.243.744.266	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/Bulan	8.488.576.612	
02	07	01	02	02	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	273.839.508	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	271.320.000	
02	07	01	02	03	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	152.769.600	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	182.532.000	
02	07	01	02	07	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	41.481.190	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	-	
02	07	01	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	148.894.946	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	42.488.600	
02	07	01	03	02	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	85.944.024	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	42.488.600	
02	07	01	03	06	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	62.950.922	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-	
02	07	01	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	366.053.597	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	259.844.000	
02	07	01	05	02	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110 Paket	91.309.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	110 Paket	-	
02	07	01	05	03	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	63.265.072	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	199.844.000	





02	07	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	180.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	60.000.000
02	07	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	31.479.025	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	-
02	07	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	1.305.877.434	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	7 Jenis	496.078.880
02	07	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.321.455	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.936.000
02	07	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	85.099.088	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	60.189.080
02	07	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	79.753.291	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Makassar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	28.413.800
02	07	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.808.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Makassar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.200.000
02	07	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	20.475.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	26.100.000
02	07	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	694.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	312.040.000
02	07	01	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	372.120.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	34.200.000
02	07	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86 Unit	661.321.447	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86 Unit	-
02	07	01	07	05	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	217.109.557	Pengadaan Mebel	Kota Makassar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	-
02	07	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	344.211.890	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	-
02	07	01	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-
02	07	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	750.214.662	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	600.136.284
02	07	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	49.999.488	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	199.409.000
02	07	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	372.126.014	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	326.992.084
02	07	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	328.089.160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Makassar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	73.735.200
02	07	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Unit	750.601.504	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Unit	263.030.000
02	07	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	53.468.140	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.380.000
02	07	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	393.186.143	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	204.440.000
02	07	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	52.174.650	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	14.210.000
02	07	01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-
02	07	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	201.772.571	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-
02	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	96,77 Persen	133.804.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	96,77 Persen	105.621.000
02	07	02	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	133.804.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Dokumen	105.621.000
02	07	02	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	96.946.952	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	62.700.000
02	07	02	01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	36.857.048	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	42.921.000
02	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,03 Persen	4.234.446.000	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,03 Persen	1.587.007.500
							Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,00 Persen				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,00 Persen	
							Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.190 Persen				Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.190 Persen	





02	07	03	01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	560 Orang	2.274.315.229	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	560 ORANG	634.974.700
02	07	03	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	560 Orang	2.079.746.445	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	560 Orang	631.982.200
02	07	03	01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024	150 Lembaga	194.568.784	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024	150 Lembaga	2.992.500
02	07	03	02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	101.276.124	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	765.300
02	07	03	02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	101.276.124	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Makassar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	80 Lembaga	765.300
02	07	03	03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	260.468.527	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	24 Perizinan	196.265.100
02	07	03	03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	24 Perizinan	260.468.527	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	24 Perizinan	196.265.100
02	07	03	04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	250 Perusahaan	454.354.794	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	250 Perusahaan	334.498.800
02	07	03	04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	250 Perusahaan	454.354.794	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	250 Perusahaan	334.498.800
02	07	03	05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	1 Dokumen	1.144.031.326	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Kota	1 Dokumen	420.503.600
02	07	03	05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1.144.031.326	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	420.503.600
02	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	65,00 Persen	1.901.789.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kota Makassar	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	65,00 Persen	909.458.920
							Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	9.555 Peluang Kerja				Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	9.555 Peluang Kerja	
02	07	04	01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	4.383 Orang	1.015.922.491	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan Fasilitasi Layanan	4.383 Orang	570.296.720
02	07	04	01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-	30 Orang	13.375.542	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-	30 Orang	-
02	07	04	01	02	Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	4.000 Orang	333.720.735	Pelayanan antar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	4.000 Orang	215.757.240
02	07	04	01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	42.307.631	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	40.346.000
02	07	04	01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	115.814.209	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	-
02	07	04	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	183 Orang	510.704.373	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	183 Orang	314.193.480
02	07	04	02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	65.835.062	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	91.357.400
02	07	04	02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	48.229.853	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kota Makassar	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	6 Lembaga	42.698.400
02	07	04	02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	17.605.209	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Makassar	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga	48.659.000
02	07	04	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	8.000 Orang	605.711.307	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	8.000 Orang	115.724.800
02	07	04	03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	63.244.068	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokumen	42.698.400
02	07	04	03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	8.000 Orang	199.965.222	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Makassar	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	8.000 Orang	73.026.400
02	07	04	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1.000 Orang	342.502.017	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Makassar	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1.000 Orang	-
02	07	04	04		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	140 Orang	214.320.140	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	140 Orang	132.080.000
02	07	04	04	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	111.896.306	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Makassar	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	41.398.000



02	07	04	04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	102.423.834	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Makassar	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	40 Orang	90.682.000				
02	07	05			Program Hubungan Industrial	Kota Makassar	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	38,50 Persen	970.534.000	Program Hubungan Industrial	Kota Makassar	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	38,50 Persen	840.641.204				
							Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	3,66 Persen				Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	3,66 Persen					
							Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	79,00 Persen				Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	79,00 Persen					
02	07	05	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	105 Perusahaan	274.220.715	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	105 Perusahaan	-				
02	07	05	01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	58.292.615	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	-				
02	07	05	01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	27.558.575	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Makassar	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	-				
02	07	05	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	188.369.525	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Makassar	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	-				
02	07	05	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	260 Perkara	696.313.285	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	260 Perkara	840.641.204				
02	07	05	02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	128.068.697	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	60 Perkara	274.087.200				
02	07	05	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	200 Perkara	230.562.246	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	200 Perkara	130.688.200				
02	07	05	02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Makassar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	31.334.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Makassar	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-				
02	07	05	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	220.603.005	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	231.708.000				
02	07	05	02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	150 Orang	85.745.338	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	150 Orang	204.157.804				
TOTAL PAGU INDIKATIF									21.236.462.000	14.144.800.000								





2.5. PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2024, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang menjadi tugas pokok dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Penelaahan terhadap usulan Program dan Kegiatan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terdapat 39 (tiga puluh sembilan) usulan kegiatan yang masuk yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan;
2. Dari 39 (tiga puluh sembilan) usulan kegiatan yang terakomodir pada Forum SKPD Kota Makassar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) usulan kegiatan atau sebesar 100 persen;
3. Dari 39 (tiga puluh sembilan) usulan kegiatan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) usulan merupakan hasil Musrenbang dan 6 (enam) usulan merupakan dari Pokok Pikiran DPRD; dan
4. Usulan Kegiatan yang masuk didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja dan Program Penempatan Tenaga Kerja;

Adapun usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar Tahun 2023 yang terakomodir di desk Forum SKPD Kota Makassar sebagaimana disajikan pada tabel dengan format formulir T-C.32 berikut:





**TABEL 2.9 (FORMAT T-C.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KOTA MAKASSAR**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Bunga Ejaya, Kota Makassar	Pelatihan mengendarai Kendaraan	2 angkatan	3 orang
2	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Onta Lama No. 1 , Kota Makassar	Pelatihan Service Handphone	3 angkatan	3 orang
3	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Aula Kantor Lurah Bontoala Tua JL.Kandea II LR.116 A NO.4 RT.005/RW.005, Kota Makassar	Pelatihan mengendarai Kendaraan	50 orang	2 orang
4	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl.Bandang No. 10, Kota Makassar	Pelatihan Kerajinan Tangan	20 orang	6 orang
5	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Rajawali No. 71 Kelurahan Lette, Kota Makassar	Pelatihan Kecantikan/Tatarias/Pangkas Rambut/Make Up Artist	20 orang	2 orang
6	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Rajawali No. 71 Kelurahan Lette, Kota Makassar	Pelatihan mengendarai Kendaraan	35 orang	2 orang
7	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Rajawali No. 71 Kelurahan Lette, Kota Makassar	Pelatihan Tata Boga/Masakan/ Pengolahan Makanan/Kuliner	19 orang	2 orang
8	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl.Bandang No. 10, Kota Makassar	Pelatihan Komputer dan Aplikasi bagi Masyarakat	20 orang	3 orang
9	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl.Bandang No. 10, Kota Makassar	Pelatihan Menjahit Tingkat Lanjutan	50 orang	2 orang
10	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl.Bandang No. 10, Kota Makassar	Pelatihan Service Handphone	5 orang	3 orang
11	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Kakatua II No. 26 RT 01 RW 02, Kota Makassar	Pelatihan Perbengkelan	15 orang	4 orang



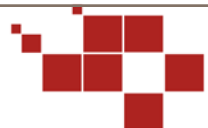


12	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Kakatua II No. 26 RT 01 RW 02, Kota Makassar	Pelatihan Service AC dan Alat Listrik Lainnya	10 orang	2 orang
13	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Andi Djemma No. 5, Kota Makassar	Pelatihan Service AC dan Alat Listrik Lainnya		4 orang
14	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Bulogading (RW : 01.02,03 & 04), Kota Makassar	Pelatihan Service AC dan Alat Listrik Lainnya		4 orang
15	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Bulogading (RW : 01,02,03 & 04), Kota Makassar	Pelatihan Menjahit Tingkat Lanjutan		4 orang
16	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Bulogading (RW : 01 ,02, 03, & 04), Kota Makassar	Pelatihan Komputer dan Aplikasi bagi Masyarakat		6 orang
17	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Gunung Latimojong III No. 25 (Aula Kantor Lurah Gaddong) Kota Makassar	Pelatihan Perbengkelan		2 orang
18	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Gunung Latimojong III No. 25 (Aula Kantor Lurah Gaddong) Kota Makassar	Pelatihan Sablon Baju		2 orang
19	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Gunung Latimojong III No. 25 (Aula Kantor Lurah Gaddong) Kota Makassar,	Pelatihan Komputer dan Aplikasi bagi Masyarakat		3 orang
20	Perluasan Kesempatan Kerja	Kantor Lurah Parang Layang, Kota Makassar	Pelatihan Kerajinan Tangan		6 orang
21	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jl . Buakana Kompleks Pertamina Blok C5, Kota Makassar	Pelatihan Kecantikan/Tatarias/Pangkas Rambut/Make Up Artist		6 orang
22	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	JL. Buakana kompleks pertamina blok c5, Kota Makassar	Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar		6 orang
23	Perluasan Kesempatan Kerja	jl. Buakana kompleks pertamina blok c5 (Kantor Lurah Buakana), Kota Makassar	Pelatihan Kerajinan Tangan		10 orang





24	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jalan Sabutung Timur No. 200, Kota Makassar	Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar	6 orang
25	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Satando No.55, Kota Makassar	Pelatihan Service Handphone	11 orang
26	Perluasan Kesempatan Kerja	Jl. Satando No.55, Kota Makassar	Pelatihan Kerajinan Tangan	17 orang
27	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Satando No.55, Kota Makassar	Pelatihan mengendarai Kendaraan	3 orang
28	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kantor Lurah Baji Mapakasunggu JL.Baji Ati I No.2 RT. 01 RW 02, Kota Makassar	Pelatihan Perbengkelan	4 orang
29	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl.Bau Maseppe No.18 b di kantor Kelurahan Baru, Kota Makassar	Pelatihan Perbengkelan	4 orang
30	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl.Bau Maseppe No.18 b di kantor Kelurahan Baru., Kota Makassar	Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar	6 orang
31	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Perjanjian Bungaya , Kota Makassar	Pelatihan Pengelasan/Perbengkelan (Welding)	4 orang
32	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Perjanjian Bungaya, Kota Makassar	Pelatihan Komputer dan Aplikasi bagi Masyarakat	3 orang
33	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Perjanjian Bungaya, Kota Makassar	Pelatihan Kecantikan/Tatarias/Pangkas Rambut/Make Up Artist	2 orang
34	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar MARIO DAVID Pn., S.Sos., MM	10 Orang
35	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Resto Citra Sudiang Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17 Peserta: Kel. Pai Kec. Biringkanaya	Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar MARIO DAVID Pn., S.Sos., MM	20 Orang
36	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Perumahan Permata Sudiang Raya RT 07 RW 12 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya	Pelatihan Kecantikan/Tatarias/Pangkas Rambut/Make Up Artist ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS, MA	20 Orang





37	Pelayanan Antar Kerja	Perumahan Griya Sudiang Permai Blok G2 No. 8 RT 02 RW 07 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya	Fasilitasi Informasi Lapangan Kerja/Pekerjaan di Masyarakat ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS, MA	20 Orang
38	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jl. Usman Dg Ngalle Kel.Tamamaung, Kec.Panakkukang	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi H. A. NURHALDIN NH	10 Orang
39	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jaln Tamangapa Raya RT.06 RW.04 Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala	Pelatihan Menjahit Tingkat DasarMUHAMMAD NASIR RURUNG	10 Orang





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

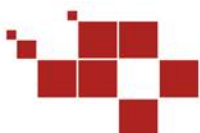
Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan paradigma pemerintahan yang juga berimplikasi pada mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Implikasi tersebut antara lain penyerahan sebagian besar kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah termasuk kewenangan dibidang Ketenagakerjaan yang menjadi urusan wajib dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kebijakan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara struktural mengacu kepada kebijakan Pemerintah Kota Makassar, namun secara fungsional tetap terkoordinasi dengan kebijakan Nasional Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan serta Instansi/Lembaga terkait lainnya.

Fungsi koordinatif ini di maksudkan agar program penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Kota Makassar tetap sejalan dengan program dan kebijakan secara nasional dalam lintas daerah, mengingat penanganan permasalahan ketenagakerjaan tidak mengenal batas wilayah.

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sector penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja melalui investasi dan menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi penduduk.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas permasalahan tenaga kerja akan berkaitan dengan pasar kerja dalam arti luas yang meliputi masalah kebutuhan dan penawaran





tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, upah tenaga kerja, serta segala dinamika lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Sebagai subjek pembangunan dimana tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya penduduk usia kerja merupakan modal utama pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang harus dijamin haknya diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral yang mempunyai keterkaitan dengan sector lain, keterkaitan itu tidak hanya kepentingan tenaga kerja tetapi juga dengan kepentingan masyarakat, mencakup pula pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan tenaga kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial.

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tengah menyusun rencana strategis (renstra) ketenagakerjaan tahun 2020-2024. Dalam Renstra tersebut menyebut 8 (delapan) arah kebijakan resntra Kemnaker pada 2020-2024. Rinciannya adalah sebagai berikut ini.

1. Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills;
3. Pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah;
4. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi "demand" tenaga kerja;
5. Memperkuat relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI);





6. Meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri;
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik;
8. Peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik.

B. Telaahan Terhadap Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

Strategi pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan, TA 2018 – 2023 bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Tenaga Kerja.

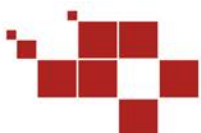
Dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan, aspek perencanaan dan informasi sangat penting artinya. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan tenaga kerja baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, serta menyediakan informasi ketenagakerjaan secara makro, sektoral dan regional yang lebih akurat dan tepat waktu.

2. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja.

Sistem informasi tenaga kerja berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan, evaluasi dan menopang tenaga kerja, khususnya perencanaan tenaga kerja. Langkah – langkah yang direkomendasikan dalam upaya memperkuat institusi pasar kerja meliputi :

- a. Memperkuat mekanisme yang ada agar koordinasi lebih efektif antara dinas terkait maupun antara unit dalam dinas.
- b. Memperkokoh proses kelemahan desentralisasi, untuk menyempurnakan kebijakan yang ada pada tingkat regional dan lokal.
- c. Mengembangkan SDM pada tingkat regional.
- d. Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang ada, termasuk upaya peningkatan kapasitas teknik sistem tersebut, serta melengkapi dengan fasilitas agar secara cepat dapat melakukan penilaian terhadap kualitas tenaga kerja yang ada.
- e. Memperkokoh dialog sosial antar kerja tripartit.

3. Perluasan kesempatan kerja dan padat karya.





Tugas penting yang harus dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Propinsi saat ini adalah menciptakan kesempatan kerja. Strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Perluasan kesempatan kerja di sektor – sektor pertanian.
 - b. Perluasan kesempatan kerja di sektor industri / usaha kecil dan menengah dan sektor Jasa.
4. Pemberdayaan dan Optimalisasi Sumber Daya Pelatihan Nasional.

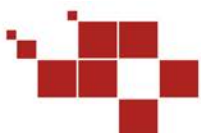
Strategi yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
 - b. Peningkatan relevansi, kualitas dan efisiensi pelatihan kerja, melalui pembinaan program, fasilitas dan sarana instruktur dan tenaga ahli pelatihan, sistem dan metode pendekatan, kelembagaan dan akreditasi.
 - c. Pengembangan jaring kerjasama pelatihan antar sektor.
5. Pengembangan Bursa Tenaga Kerja Terpadu :

Untuk memperbaiki layanan ketenagakerjaan dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam pemberdayaan bursa tenaga kerja, direncanakan beberapa program sebagai berikut:

- a. Dikembangkan suatu program yang mampu memberikan bantuan dan tanggapan yang cepat terhadap tenaga kerja yang terkena PHK, juga perusahaan, Serikat Pekerja dan masyarakat yang menderita akibat lesunya ekonomi, penutupan pabrik/ perusahaan atau pemutusan hubungan kerja masal.
 - b. Perlunya suatu jaringan komunikasi yang on line dengan seluruh Dinas Tenaga Kerja agar informasi dan data bursa tenaga kerja dapat dihasilkan dan dikirim tepat waktu.
 - c. Perubahan status bursa tenaga kerja mutlak dilakukan agar reformasi bursa tenaga kerja dapat berhasil, karena hal ini akan menarik para profesional dan mereka yang memiliki keahlian teknis untuk bekerja di kantor bursa tenaga kerja.
6. Penempatan Tenaga Kerja Ke luar Negeri.

Dalam upaya memperoleh dan memperluas kesempatan kerja di luar negeri bagi Tenaga Kerja Indonesia, sekaligus untuk memperbesar prolehan devisa melalui remittansi, maka





program export jasa tenaga kerja ke luar negeri akan terus ditingkatkan.

7. Implementasi Hubungan Industrial dalam Iklim Keterbukaan

Beberapa upaya strategis yang diperlukan adalah :

- a. Reformasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).
- b. Pendidikan Perburuhan.
- c. Pemasyarakatan keadaan baru dibidang hubungan industrial dalam era keterbukaan.

8. Perlindungan dan Peningkatan Kehidupan Serta Kesejahteraan Pekerja.

Dalam upaya peningkatan taraf hidup pekerja, agar dapat hidup lebih layak perlu adanya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Strategi yang akan dilaksanakan :

- a. Perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan perempuan;
- b. Jaminan sosial syarat kerja;
- c. Perlindungan pengupahan;
- d. Perlindungan tenaga kerja keluar negeri;
- e. Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- f. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- g. Penegakan hukum dan pengawasan norma ketenagakerjaan.

C. Telaahan Terhadap Kebijakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun yang menjadi target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :





Tabel.3.1
Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TARGET	INDIKATOR
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.	
8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal
8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja
	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
	8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran
8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	
10.4. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	10.4.1. (a) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).



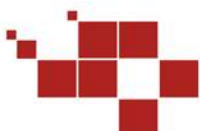


3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

Dalam implementasi seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan dimana untuk non urusan sesuai dengan misi pertama (1) “Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi”, pada tujuan 1.2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Efektif pada sasaran 1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah. Sedangkan untuk urusan tenaga kerja sesuai dengan misi kedua (2) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan Kota yang Kuat Untuk Semua”, pada tujuan 2..2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru serta pada sasaran 2.2.2. Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi. Adapun rumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025

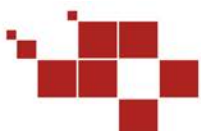
Tujuan 1: Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru		
Indikator Tujuan: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		61,81%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1.1. Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	1.1.1. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	52,50%
	1.1.2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,50%
Tujuan 2 Mewujudkan Hubungan Industrial yang Kondusif		
Indikator Tujuan: Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun		3,27%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
2.1. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis	2.1.1. Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	3,27%
Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan		
Indikator Tujuan: Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		49,00%
Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja





3.1 Tersedianya Administasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan	1.1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00%
	1.1.2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	81,50%

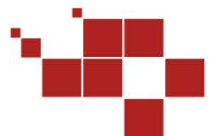
Adapun sinkronisasi arah kebijakan dengan pusat dan provinsi dapat dilihat pada tabel 3.3 dan konsistensi dengan dokumen Perencanaan Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini:





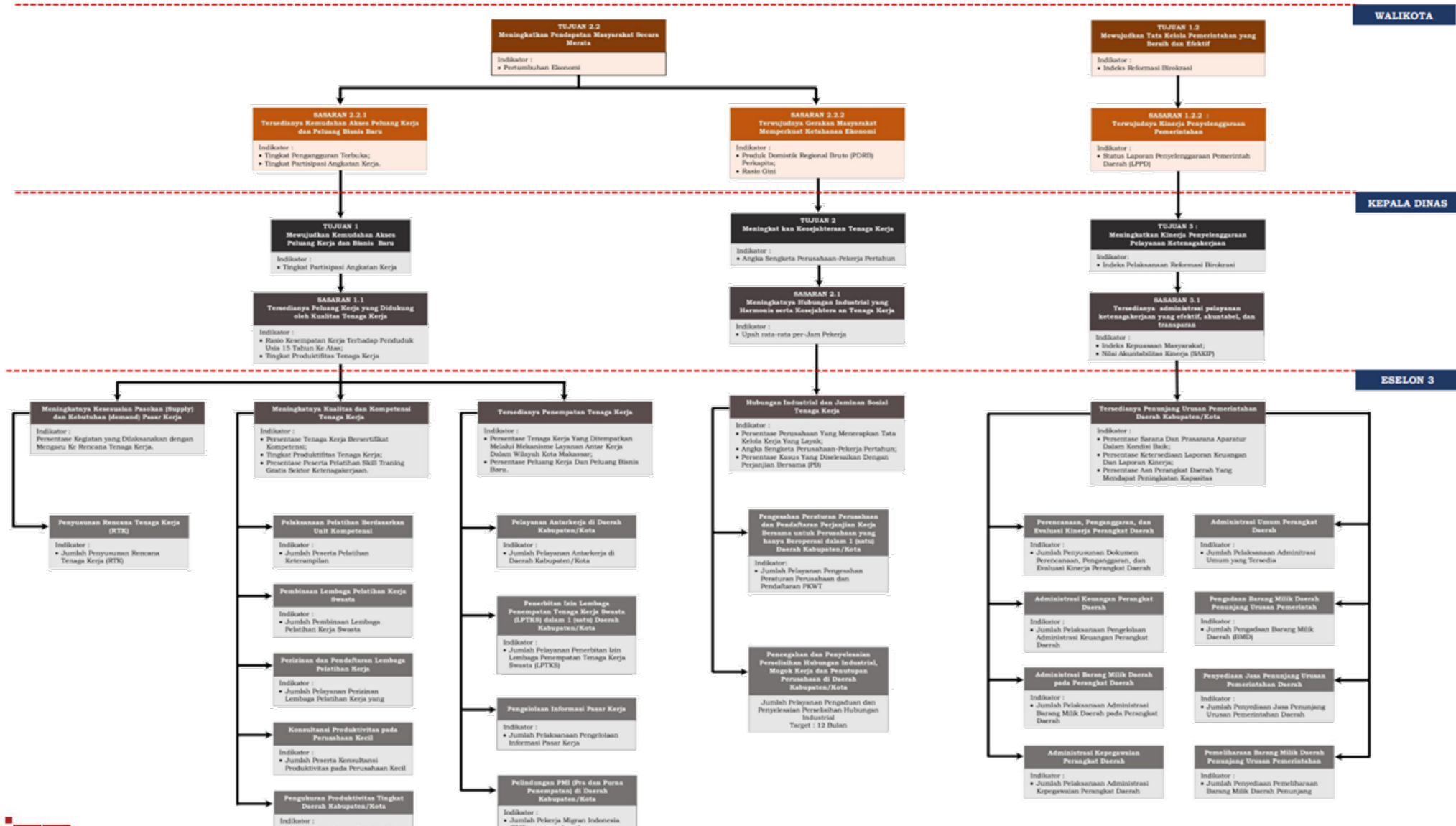
TABEL 3.3
TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN PUSAT DAN PROVINSI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR
1. Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi	1. Meningkatkan informasi tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua.	1. Meningkatkan Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi demand tenaga kerja			
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millenial (pendidikan vokasi) dan soft skills	2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, nasional dan pasar kerja internasional serta memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal		
4. Pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah			
5. Menguatkan relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI)			
6. Meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru pekerja migran Indonesia di luar negeri			
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.	3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	2. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	2. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis serta Kesejahteraan Tenaga Kerja





TABEL 3.4
CASCADING/PENJENJANGAN KINERJA DINAS KETENAGAKERJAAN





3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mengimplementasikan seluruh jenis pelayanan dan tugas Dinas Ketenagakerjaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Makassar, sehingga RENJA Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dan stakeholder

Sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kota Makassar, arah kebijakan dan strategi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2025 disusun untuk mendukung pencapaian pada sasaran pembangunan sebagai berikut: Sasaran 2.2.1. "Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru", melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang diimplementasikan pada Program Penempatan Tenaga Kerja.

Adapun keterkaitan antara RKPD Kota Makassar Tahun 2025 dengan Program Prioritas dalam Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 (T-B.52)

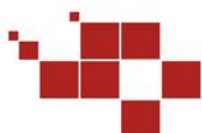
Rumusan Program Prioritas

➤ **Sasaran 2.2.1 : Meningkatkan Kompetensi angkatan kerja dan pemuda**

Indikator : - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Program Pembangunan Daerah (Strategik)	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rendahnya mutu dan kompetensi sumber daya tenaga kerja	Meningkatnya keterampilan tenaga kerja yang berdaya saing	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,03%
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,00%
			Jumlah Peserta Pelatihan Skill	1.190 Orang





			Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingginya angka pengangguran	Penyediaan peluang kerja dan bisnis baru	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	65,00%
			Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	9.555 Peluang Kerja

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis teknis yang diimplementasikan dalam 4 (empat) urusan wajib yang dirumuskan berdasarkan:

1. Usulan Masyarakat melalui proses musrenbang dan forum SKPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar;
2. Rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025.

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian SDGs dalam pembangunan berkelanjutan
2. Pengentasan pengangguran;
3. Pencapaian target Sasaran pada RPJMD Tahun 2022-2026 Kota Makassar;
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Perumusan program dan kegiatan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Tahapan ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan





sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional.

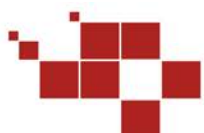
Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan bidang ketenagakerjaan maka dibuatlah program prioritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Langkah strategis mulai dari melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Selain itu dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mendapatkan pemagangan dan sertifikasi profesi/kompetensi.

Langkah strategis ke 2 (dua) melalui Program Penempatan Tenaga Kerja melalui pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja/buruh terdampak Covid-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Dimana dampak negatif Covid-19 di bidang ketenagakerjaan, tidak hanya dirasakan oleh perusahaan dan pekerjanya di sektor formal. Namun juga dirasakan oleh pekerja di sektor informal seperti buruh bebas maupun pekerja mandiri.

Langkah strategis ketiga, Dinas Ketenagakerjaan melalui Program Hubungan Industrial telah melakukan pendataan terutama perusahaan yang terdampak serta jumlah pekerja yang dirumahkan dan atau di PHK; pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja sehingga di perlakukan secara adil oleh pemberi kerja melalui pelatihan kerja dan memperoleh pelatihan-pelatihan, membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat Covid-19 dan meningkatkan layanan mediasi bila terjadi perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

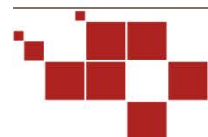
Penyusunan program perangkat daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program perangkat daerah sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini:





Tabel 3.6 (T-B.52)
Keterkaitan Tujuan, Sasaran Dan Program Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Baseline	Target Kinerja
1. Mewujudkan Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,04%	1.1 Tersedianya Peluang Kerja yang Didukung oleh Kualitas Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	87,55%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	93,33%	96,77%
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	58,32%	65,00%
							Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru	8.483 Peluang Kerja	9.555 Peluang Kerja
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,00%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
							Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20,69%	22,00%
							Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.122 Orang	1.190 Orang
2. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	3,66%	2.1 Meningkat nya Hubungan Industrial yang Harmonis	Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	3,66%	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	30,75%	38,50%
							Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	4,67%	3,66%





							Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	61,38%	79,00%	
3.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	48,00%	3.1 Tersedianya administasi pelayanan ketenaga-kerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	88,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	90,00%	90,00%
						81,00%	Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%
								Persentase Asn Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90,00%	90,00%

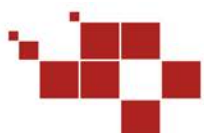




Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Direncanakan dengan 5 (lima program), 20 (dua puluh) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan;
2. Tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Makassar;
3. Kebutuhan dana sebesar Rp.14.144.800.000,- (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagaimana tertuang pada tabel dengan format formulir T-C.33 berikut:

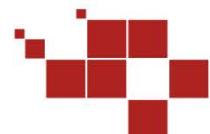




**LAMPIRAN VI (FORMAT T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA MAKASSAR**

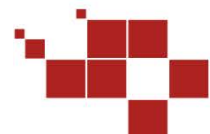
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETENAGAKERJAAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
02	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				14.144.800.000			21.236.462.000		
02	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Kota Makassar	90 Persen	10.702.071.376	APBD	90 Persen	13.995.889.000	
				Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		100 Persen			100 Persen		
				Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		90 Persen			90 Persen		
02	07	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	12 Dokumen	98.065.000	APBD	13 Dokumen	301.090.846	
02	07	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	2 Dokumen	61.260.000	APBD	2 Dokumen	141.880.522
02	07	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	6.345.000	APBD	1 Dokumen	10.160.239
02	07	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	5.920.000	APBD	1 Dokumen	9.531.126
02	07	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	5.105.000	APBD	1 Dokumen	9.504.603
02	07	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Makassar	1 Dokumen	5.105.000	APBD	1 Dokumen	8.915.804
02	07	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Makassar	4 Dokumen	7.130.000	APBD	5 Dokumen	112.455.400
02	07	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	2 Dokumen	7.200.000	APBD	2 Dokumen	8.643.152
02	07	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	48 Dokumen	8.942.428.612	APBD	48 Dokumen	9.711.834.564	



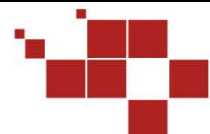


02	07	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	61 Orang/Bulan	8.488.576.612	APBD		61 Orang/Bulan	9.243.744.266
02	07	01	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Makassar	12 Dokumen	271.320.000	APBD		12 Dokumen	273.839.508
02	07	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	12 Dokumen	182.532.000	APBD		12 Dokumen	152.769.600
02	07	01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Makassar	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	41.481.190
02	07	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Kota Makassar	12 Dokumen	42.488.600	APBD		12 Dokumen	148.894.946
02	07	01	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	12 Dokumen	42.488.600	APBD		12 Dokumen	85.944.024
02	07	01	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	62.950.922
02	07	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Makassar	12 Dokumen	259.844.000	APBD		12 Dokumen	366.053.597
02	07	01	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Makassar	110 Paket	-	APBD		110 Paket	91.309.500
02	07	01	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	12 Dokumen	199.844.000	APBD		12 Dokumen	63.265.072
02	07	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Makassar	20 Orang	60.000.000	APBD		20 Orang	180.000.000
02	07	01	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Makassar	50 Orang	-	APBD		50 Orang	31.479.025
02	07	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	Kota Makassar	7 Jenis	496.078.880	APBD		7 Jenis	1.305.877.434
02	07	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	1 Paket	9.936.000	APBD		1 Paket	13.321.455
02	07	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	5 Paket	60.189.080	APBD		5 Paket	85.099.088
02	07	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	3 Paket	28.413.800	APBD		3 Paket	79.753.291
02	07	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Makassar	2 Paket	25.200.000	APBD		2 Paket	40.808.600
02	07	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Makassar	12 Dokumen	26.100.000	APBD		12 Dokumen	20.475.000
02	07	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Makassar	12 Laporan	312.040.000	APBD		12 Laporan	694.300.000
02	07	01	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Kota Makassar	12 Dokumen	34.200.000	APBD		12 Dokumen	372.120.000



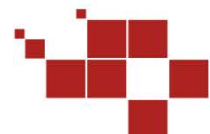


02	07	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	86 Unit	-	APBD		86 Unit	661.321.447
02	07	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Makassar	25 Unit	-	APBD		25 Unit	217.109.557
02	07	01	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Makassar	60 Unit	-	APBD		60 Unit	344.211.890
02	07	01	07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Makassar	1 Unit	-	APBD		1 Unit	100.000.000
02	07	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	36 Laporan	600.136.284	APBD		36 Unit	750.214.662
02	07	01	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Makassar	12 Laporan	199.409.000	APBD		12 Laporan	49.999.488
02	07	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Makassar	12 Laporan	326.992.084	APBD		12 Laporan	372.126.014
02	07	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Makassar	12 Laporan	73.735.200	APBD		12 Laporan	328.089.160
02	07	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Makassar	49 Unit	263.030.000	APBD		49 Unit	750.601.504
02	07	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Makassar	1 Unit	44.380.000	APBD		1 Unit	53.468.140
02	07	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Makassar	16 Unit	204.440.000	APBD		16 Unit	393.186.143
02	07	01	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Makassar	30 Unit	14.210.000	APBD		30 Unit	52.174.650
02	07	01	09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang	Kota Makassar	1 Unit	-	APBD		1 Unit	50.000.000
02	07	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Makassar	1 Unit	-	APBD		1 Unit	201.772.571
02	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	Kota Makassar	96,77 Persen	105.621.000	APBD		96,77 Persen	133.804.000
02	07	02	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Makassar	2 Dokumen	105.621.000	APBD		2 Dokumen	133.804.000
02	07	02	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Makassar	1 Dokumen	62.700.000	APBD		1 Dokumen	96.946.952
02	07	02	01	03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kota Makassar	40 Perusahaan	42.921.000	APBD		50 Perusahaan	36.857.048
02	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Kota Makassar	1,03 Persen	1.587.007.500	APBD		1,10 Persen	4.234.446.000
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	22,00 Persen					22,50 Persen		
					Jumlah Peserta Pelatihan Skill Traning Gratis Sektor Ketenagakerjaan	1.190 Orang					1.230 Orang		
02	07	03	01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	Kota Makassar	560 Orang	634.974.700	APBD		560 Orang	2.274.315.229



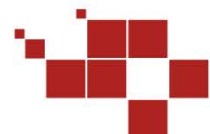


02	07	03	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	Kota Makassar	560 Orang	631.982.200	APBD		560 Orang	2.079.746.445
02	07	03	01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2024	Kota Makassar	20 Lembaga	2.992.500	APBD		150 Lembaga	194.568.784
02	07	03	02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Makassar	20 Lembaga	765.300	APBD		80 Lembaga	101.276.124
02	07	03	02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kota Makassar	20 Lembaga	765.300	APBD		80 Lembaga	101.276.124
02	07	03	03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Makassar	12 Perizinan	196.265.100	APBD		24 Perizinan	260.468.527
02	07	03	03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Makassar	12 Perizinan	196.265.100	APBD		24 Perizinan	260.468.527
02	07	03	04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Makassar	250 Perusahaan	334.498.800	APBD		250 Perusahaan	454.354.794
02	07	03	04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kota Makassar	250 Perusahaan	334.498.800	APBD		250 Perusahaan	454.354.794
02	07	03	05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Makassar	1 Dokumen	420.503.600	APBD		1 Dokumen	1.144.031.326
02	07	03	05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kota Makassar	1 Dokumen	420.503.600	APBD		1 Dokumen	1.144.031.326
02	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	Kota Makassar	65,00 Persen	909.458.920	APBD		75,00 Persen	1.901.789.000
					Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru		9.555 Peluang Kerja					10.100 Peluang Kerja	
02	07	04	01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga kerja yang Ditempatkan, Diberdayakan dan	Kota Makassar	4.383 Orang	570.296.720	APBD		4.383 Orang	1.015.922.491
02	07	04	01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Kota Makassar	- Orang	-	APBD		30 Orang	13.375.542
02	07	04	01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Kota Makassar	4.000 Orang	215.757.240	APBD		4.000 Orang	333.720.735
02	07	04	01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Makassar	100 Orang	40.346.000	APBD		100 Orang	42.307.631
02	07	04	01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kota Makassar	100 Orang	-	APBD		100 Orang	115.814.209
02	07	04	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Makassar	183 Orang	314.193.480	APBD		183 Orang	510.704.373



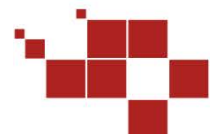


02	07	04	02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kota Makassar	6 Lembaga	91.357.400	APBD		6 Lembaga	65.835.062
02	07	04	02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Kota Makassar	6 Lembaga	42.698.400	APBD		6 Lembaga	48.229.853
02	07	04	02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Kota Makassar	4 Lembaga	48.659.000	APBD		4 Lembaga	17.605.209
02	07	04	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Makassar	8.000 Orang	115.724.800	APBD		8.000 Orang	605.711.307
02	07	04	03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja	Kota Makassar	12 Dokumen	42.698.400	APBD		12 Dokumen	63.244.068
02	07	04	03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Makassar	8.000 Orang	73.026.400	APBD		8.000 Orang	199.965.222
02	07	04	03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Kota Makassar	1.000 Orang	-	APBD		1.000 Orang	342.502.017
02	07	04	04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang Mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan	Kota Makassar	140 Orang	132.080.000	APBD		140 Orang	214.320.140
02	07	04	04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Kota Makassar	100 Orang	41.398.000	APBD		100 Orang	111.896.306
02	07	04	04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Kota Makassar	40 Orang	90.682.000	APBD		40 Orang	102.423.834
02	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak	Kota Makassar	38,50 Persen	840.641.204	APBD		51,01 Persen	970.534.000
				Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun	3,66 Persen	2,50 Persen							
				Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	79,00 Persen	89,00 Persen							
02	07	05	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	105 Perusahaan	-	APBD		105 Perusahaan	274.220.715
02	07	05	01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kota Makassar	100 Perusahaan	-	APBD		100 Perusahaan	58.292.615
02	07	05	01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kota Makassar	5 Perusahaan	-	APBD		5 Perusahaan	27.558.575
02	07	05	01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Makassar	12 Laporan	-	APBD		12 Laporan	188.369.525





02	07	05	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Makassar	260 Perkara	840.641.204	APBD		260 Perkara	696.313.285
02	07	05	02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Makassar	60 Perkara	274.087.200	APBD		60 Perkara	128.068.697
02	07	05	02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kota Makassar	200 Perkara	130.688.200	APBD		200 Perkara	230.562.246
02	07	05	02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kota Makassar	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	APBD		12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	31.334.000
02	07	05	02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kota Makassar	2 Lembaga	231.708.000	APBD		2 Lembaga	220.603.005
02	07	05	02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Makassar	150 Orang	204.157.804	APBD		150 Orang	85.745.338





BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA

Arah kebijakan dan strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar tahun 2022-2026 disusun untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Sombere Dan Smart City Dengan Imunitas Kuat Untuk Semua” yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan serta upaya dalam pencapaian Misi 2 (kedua) Kota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua” pada tujuan 2.2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata pada sasaran 2.2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru. Arah kebijakan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas RPJMD 2022-2026 Kota Makassar yang mencakup bidang ketenagakerjaan

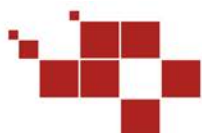
Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja; meningkatkan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja; meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial, Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar menyusun rencana operasional teknis yang diimplementasikan dalam 5 (lima) program dimana terbagi dalam skala prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama (1), merupakan program yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian program strategis Walikota Makassar antara lain :

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja merupakan implementasi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan Program Strategis Walikota Terpilih “10.000 Skill Training Gratis” dan “Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, keterampilan, keahlian dan produktivitas tenaga kerja melalui





pelatihan kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. Sehingga dengan peningkatan kualitas tenaga kerja diharapkan dapat mendorong tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja.

Pada program ini disusun dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.587.007.500 ,- (satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja program sebagai berikut :

- 1) Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, dengan indikator ini dapat diukur besaran tenaga kerja Kota Makassar yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi. Pada tahun 2025 di targetkan 1,03 persen tenaga kerja bersertifikat kompetensi;
- 2) Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja, indikator ini untuk mengukur rata-rata tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu. Pada tahun 2025 di targetkan sebesar 22,00 persen Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja;
- 3) Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan, indikator ini untuk mengetahui distribusi Dinas Ketenagakerjaan dalam Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota Makassar “10.000 Skill Training Gratis. Pada tahun 2025 di targetkan sebanyak 1.190 peserta skill training gratis.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja merupakan implementasi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam mewujudkan Misi 2 (kedua) Walikota dan Wakil Walikota Makassar “Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan kota yang kuat untuk semua” pada tujuan 2 (kedua) “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi” dan sasaran 2.1. Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru dalam Program Strategis “Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru”.





Program ini bertujuan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik sektor formal maupun sektor informal secara remunerative, produktif, layak dan sejahtera baik dalam maupun di luar negeri.

Pada program ini disusun dengan pagu anggaran sebesar Rp.909.458.920,- (sembilan ratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) untuk pencapaian 2 (dua) indikator kinerja program sebagai berikut :

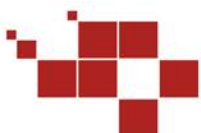
- 1) Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar, indikator ini untuk mengukur besaran penempatan tenaga kerja Kota Makassar melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar. Pada tahun 2025 di targetkan 65,00 persen Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar;
 - 2) Jumlah Peluang Kerja Dan Peluang Bisnis Baru, indikator ini untuk mengetahui distribusi Dinas Ketenagakerjaan dalam Program Strategis Walikota dan Wakil Walikota Makassar “Penyediaan dengan Kemudahan Akses 100.000 Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru. Pada tahun 2025 di targetkan 9.555 kemudahan akses peluang kerja dan bisnis baru.
2. Prioritas Kedua (2), merupakan program yang secara tidak langsung mendukung program strategis Walikota dan merupakan perwujudan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program Perencanaan Tenaga Kerja merupakan implementasi pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dalam menunjang pencapaian Misi 1 dan Misi ke 2 Pemerintah Kota Makassar.

Program ini merupakan proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Pada program ini disusun dengan pagu anggaran sebesar Rp.105.621.000,- (seratus lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk pencapaian 1 (tiga) indikator kinerja program yaitu Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke





Rencana Tenaga Kerja. Indikator tersebut untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan mengacu pada Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro. Pada tahun 2025 di targetkan 96,77 persen Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja.

b. Program Hubungan Industrial

Program ini bertujuan untuk perbaikan syarat kerja dan sistim pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja/pengusaha.

Pada program ini disusun dengan pagu anggaran sebesar Rp.840.641.204,- (delapan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat rupiah) untuk pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja program sebagai berikut :

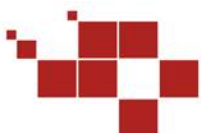
- 1) Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak. Pada tahun 2025 di targetkan 38,50 persen Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak;
- 2) Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun. Pada tahun 2025 di targetkan 3,66 persen Angka Sengketa Perusahaan-Pekerja Pertahun;
- 3) Persentase Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB) Pada tahun 2025 di targetkan 79,00 persen Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB).

3. Penunjang, merupakan program penunjang urusan pemerintahan daerah antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai penunjang urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan demi terciptanya administrasi pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Pada program ini disusun dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.702.071.376,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja program sebagai berikut :





- 1) Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik. Pada tahun 2025 di targetkan 90,00 persen Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik ;
- 2) Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 di targetkan 100,00 persen Ketersediaan Laporan Keuangan Dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Persentase ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas. Pada tahun 2025 di targetkan 90,00 persen ASN Perangkat Daerah Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas.

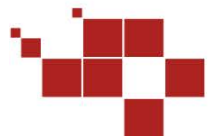
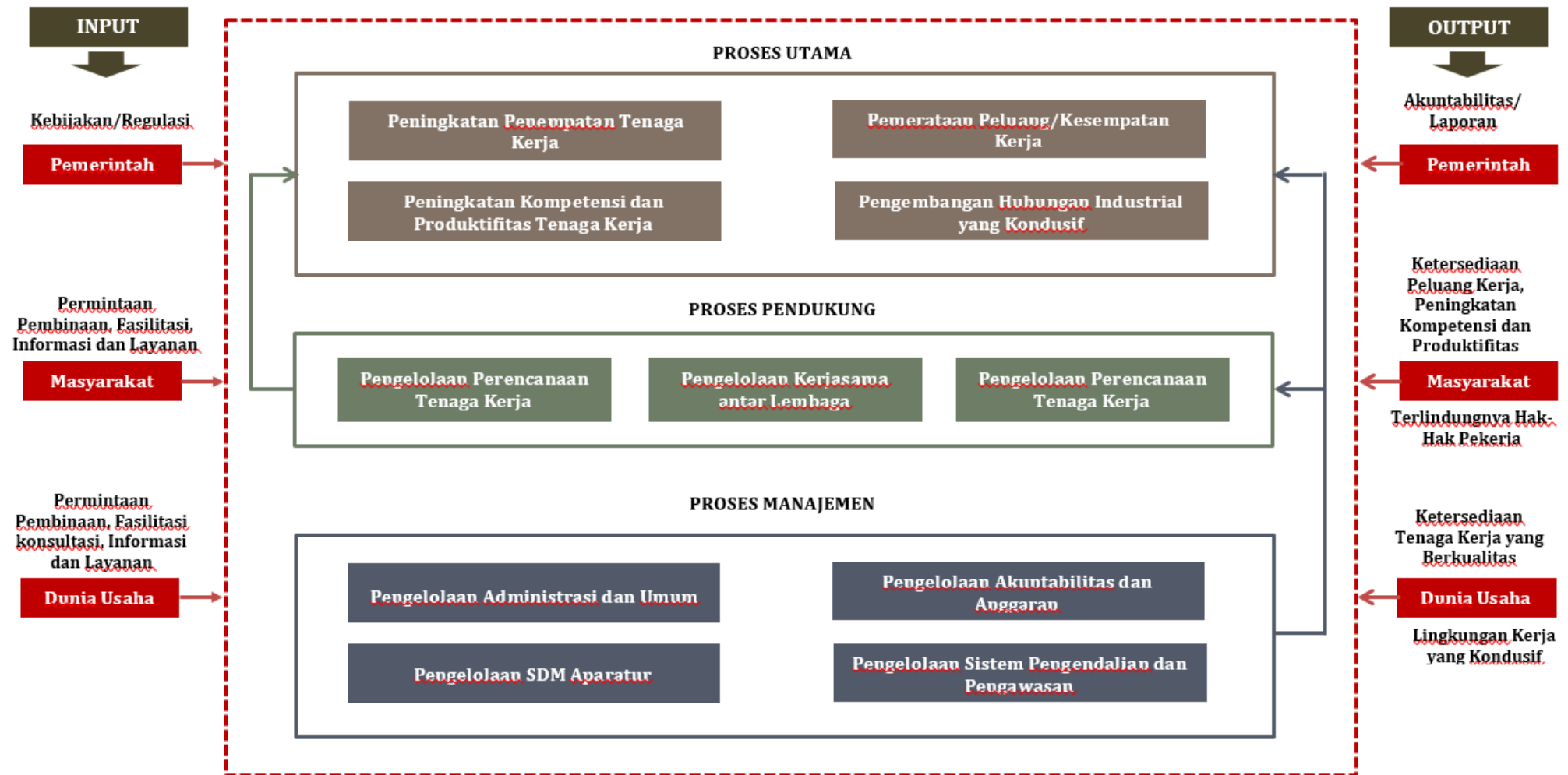
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur Dinas Ketenagakerjaan telah menyusun Peta Proses Bisnis yang menggambarkan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Peta Proses Bisnis Dinas Ketenagakerjaan menggunakan format BPMN (Business Process Modeling and Notation) sebagaimana tertuang pada gambar berikut:





PROSES BISNIS PENCAPAIAN TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MAKASSAR

LEVEL 1





4.2. PENDANAAN

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan bidang ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 direncanakan dalam 5 (lima) program terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan;
2. Lokasi program dan kegiatan tersebar pada semua Kecamatan se Kota Makassar, yang secara lebih spesifik kelompok sasaran yang dituju adalah para pencari kerja, tenaga kerja/buruh, organisasi pekerja/buruh, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, dan masyarakat umum lainnya yang membutuhkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan serta perangkat daerah;
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2025, adalah : Rp.14.144.800.000,- (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Dimana dari usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Makassar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) usulan kegiatan yang terakomodir oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) usulan kegiatan;
4. Rumusan kegiatan mengalami perubahan dari rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kota Makassar.





BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2025. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyusun Rencana Kerja untuk tahun anggaran yang sedang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan Kota Makassar dan pagu indikatif yang ditetapkan pada RKPD Kota Makassar tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025 memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dilengkapi sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk tahun anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Tahun 2025 bertujuan untuk





meningkatkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan yang mandiri, berdaya Saing, harmonis dan sejahtera. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2025, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan dari Pemerintah Kota Makassar, Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, serta Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam





proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik.
3. Seluruh bidang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2025 wajib mengupayakan agar setiap target kinerja sesuai indikator dapat tercapai.
4. Melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan dengan melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja.
5. Penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Makassar, 19 Juli 2024

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA MAKASSAR

NIELMA PALAMBA, SH., M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc

NIP : 19651210 199112 2 006





MAKASSAR
KOTA YANG BAIK
UNTUK SEMUA